

# RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2021 - 2026



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| Daftar Isi.....  | i   |
| Daftar Gambar.....   | ii  |
| Daftar Tabel.....  | iii |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 6   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....   | 13  |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....   | 13  |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU.....   | 16  |
| 2.1 Kondisi Makro Berkaitan Dengan Pelayanan Perangkat Daerah.....   | 16  |
| 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....   | 19  |
| 2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah.....  | 25  |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....   | 51  |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....  | 54  |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas<br>Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... | 54  |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih.....  | 55  |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....  | 58  |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...   | 61  |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....  | 61  |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....   | 63  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....   | 63  |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....   | 66  |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....   | 66  |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....   | 69  |
| 6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif.....  | 69  |
| BAB VII KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU<br>PINTU.....   | 85  |
| 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....   | 85  |
| BAB VIII PENUTUP.....  | 87  |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....   | 4  |
| Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Lain .....   | 5  |
| Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>Kota Surabaya..... | 19 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Berdasarkan Status Kepegawaian .....                   | 20 |
| Tabel 2.2 Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Berdasarkan Golongan/Ruang .....                       | 20 |
| Tabel 2.3 Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                    | 21 |
| Tabel 2.4 Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.....  | 21 |
| Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.....                | 26 |
| Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya ..... | 48 |
| Tabel 2.7 Pemetaan Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....   | 52 |
| Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....  | 55 |
| Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD.....                        | 56 |
| Tabel 3.3 Pemetaan Telaah dan Faktor Pendorong serta Penghambat Berdasarkan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....                                | 58 |
| Tabel 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....  | 61 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.....                 | 64 |
| Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....   | 67 |
| Tabel 5.2 Linearitas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....                            | 68 |
| Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....                    | 72 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....   | 86 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai ketentuan pasal 45 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan kondisi umum perangkat daerah, kondisi keuangan perangkat daerah dan identifikasi permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur yang ada pada Perangkat Daerah (PD)

Renstra DPMPTSP Kota Surabaya 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana stretegis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Kota Surabaya tahun 2021 – 2026 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DMPPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kota Surabaya dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, sesuai dengan kurun waktu RPJMD Kota Surabaya tahun 2021 – 2026.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom-up*), sesuai pendekatan yang dimaksud, maka Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan Resntra dilakukan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) dan koordinasi dengan bidang – bidang dan pihak yang terkait.

Penyesuaian (reviu) dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya ini sejalan dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaannya, dimana Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

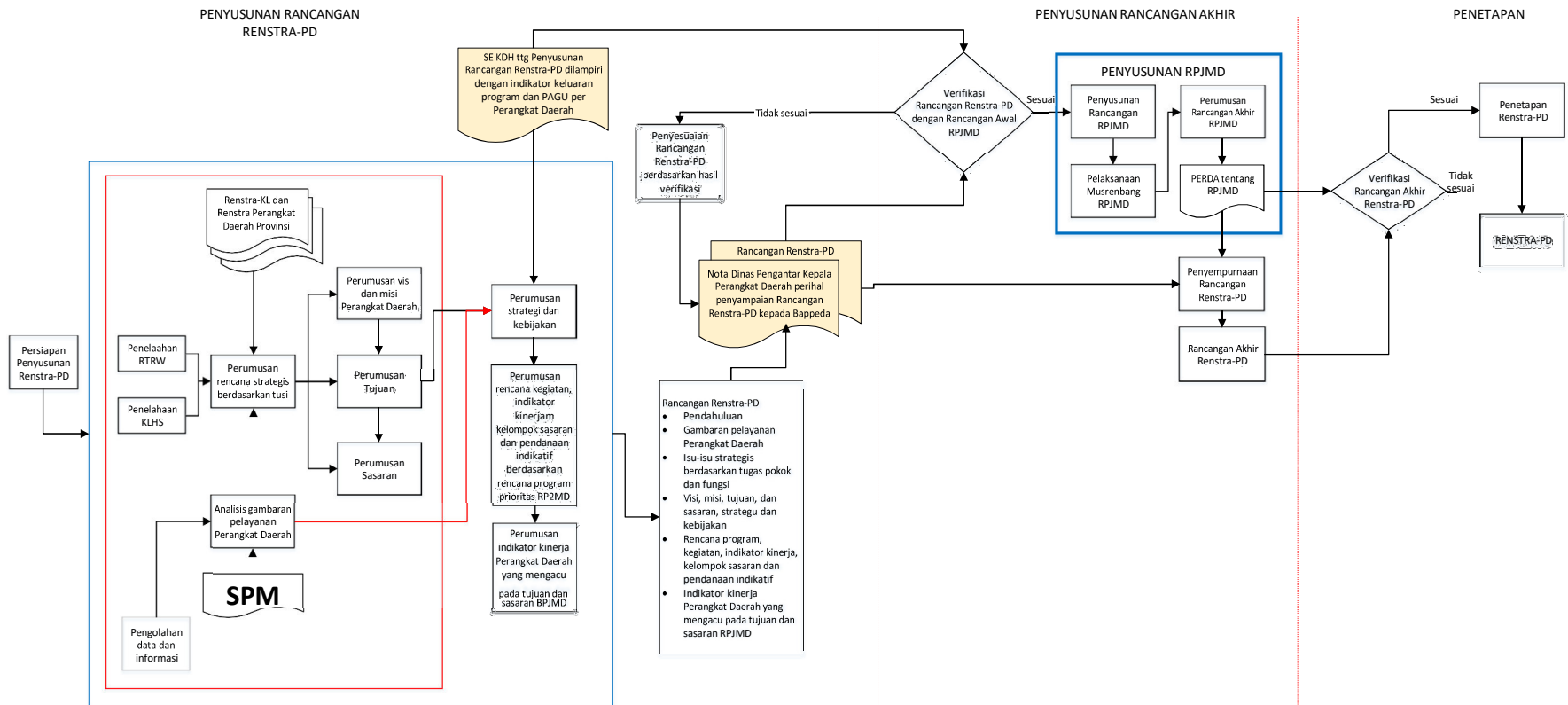
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Renstra-PD Tahun 2021 - 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renstra-PD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat (1) bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Adapun penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

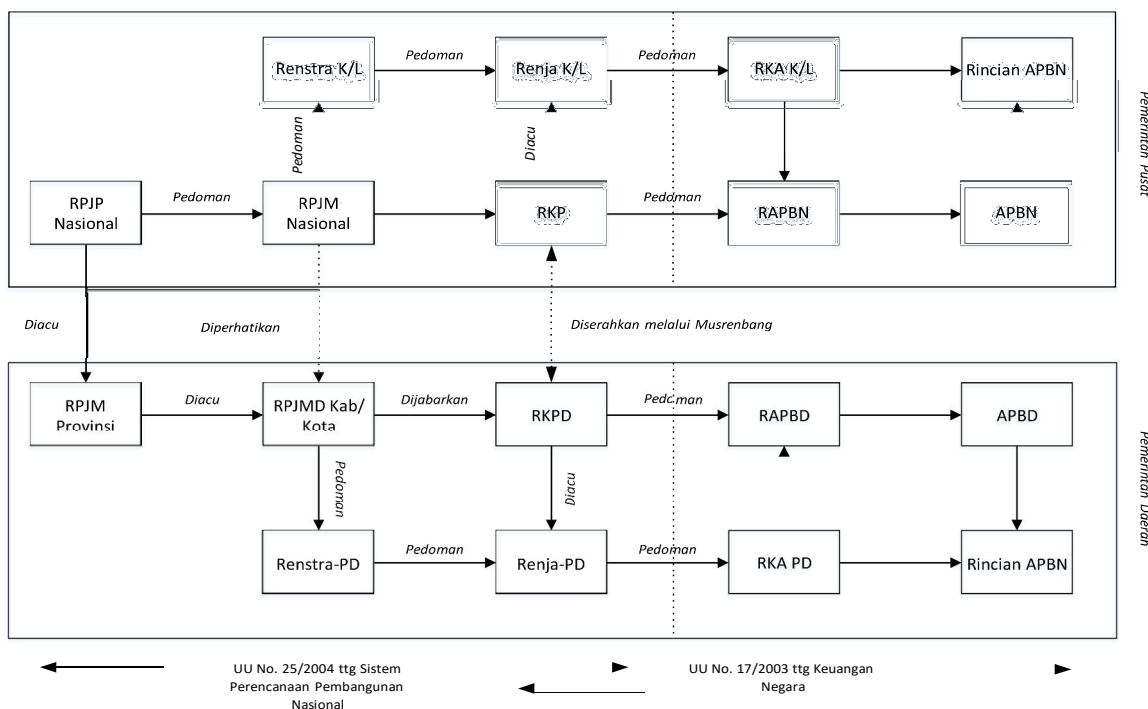
Gambar 1.1  
 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



Renstra-PD Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya periode 2022 – 2026 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2020 -2024 dan RPJMN Tahun 2020 -2024. Jadi, RPJMD Kota Surabaya periode 2022 -2026 ini digunakan sebagai pedoman didalam penyusunan Renstra-PD. Pada lingkup pemerintahan Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Adapun gambaran tentang hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Renstra dengan Dokumen Lain**



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya didasari landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259).

21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225).
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara I-7 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E).
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15).
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D).
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D).
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16).
35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12).
36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3)
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
  38. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
  39. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/282/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjaga tingkat kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten/ Kota mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terkait ruang lingkup Penyelenggara, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang, dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan yang memayungi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Dalam pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2021-2026 mengacu kepada peraturan terbaru yakni peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pencabutan peraturan tersebut diatas dikarenakan urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga tidak memerlukan standar pelayanan minimal.

Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.

Selain EPPD, dikenal pula Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EKPPD. EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan

sistem pengukuran kinerja yaitu sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait dengan sistem pengukuran kinerja maka akan dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2021-2026 masih menunggu petunjuk teknis untuk lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Sub bab ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyesuaian (reviu) Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Maksud penyesuaian (reviu) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (5 tahun) dan perubahan - perubahan dalam pelaksanaannya;
- b. Menyelaraskan rencana strategis Kota Surabaya dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, evaluasi kinerja tahun lalu, serta regulasi peraturan perundang - undangan menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

Tujuan Penyesuaian (reviu) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya sebagai berikut :

- c. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan;
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 2.1. Kondisi Makro Berkaitan Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.3. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 4.2. Penjenjangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

## BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, khususnya dalam bidang penanaman modal. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/informasi dan realisasi proyek penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
- e. Pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
- f. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal, termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- h. Pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian penanaman modal;
- j. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- k. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervise dan konsultasi pelayanan

- perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- m. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
  - n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - o. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
- c. UPTD;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

#### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;

- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasisgender dan risiko;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- l. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Perangkat Daerah;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian dibantu oleh Pejabat Fungsional yang diberi tambahan sebagai Sub Koordinator. Rincian tugas **Sub Bagian Keuangan** sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

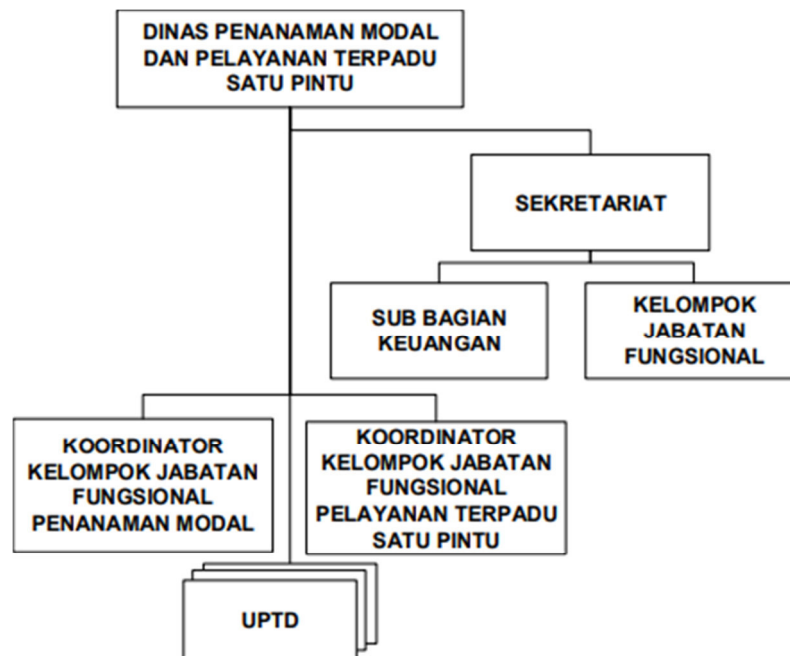
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di SubBagian Keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran/perubahan anggaran;
- e. Melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
- f. Menyusun laporan keuangan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

### Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

### Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan Sekretariat ditetapkan oleh Walikota.



**Gambar 2.1**  
**Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjelaskan Sumber memiliki berbagai sumber daya baik yang berupa manusia maupun yang berupa asset/modal. Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan Juni 2021 adalah sebanyak 43 orang dan tenaga kontrak 109 orang, sehingga total sebanyak 152 orang. Untuk perinciannya, komposisi pegawai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya berdasarkan status kepegawaian, golongan/ruang, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1, 2.2, dan 2.3 berikut:

**Tabel 2.1**

**Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Berdasarkan Status Kepegawaian**

| No | Status Kepegawaian                                | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (L+P) |
|----|---|-----------|-----------|--------------|
| 1  | Pegawai Negeri Sipil (PNS)                        | 22        | 21        | 43           |
| 2  | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 0         | 0         | 0            |
| 3  | Tenaga Kontrak Kerja                              | 71        | 38        | 109          |
|    | Total   | 93        | 59        | 152          |

**Tabel 2.2**

**Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Berdasarkan Golongan/Ruang**

| No       | Golongan/Ruang      | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (L+P) |
|----------|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Golongan IV</b>  |           |           |              |
|          | • IV/c              | 1         | 0         | 1            |
|          | • IV/b              | 2         | 0         | 2            |
|          | • IV/a              | 1         | 0         | 1            |
| <b>2</b> | <b>Golongan III</b> |           |           |              |
|          | • III/a             | 0         | 1         | 1            |
|          | • III/b             | 1         | 2         | 3            |
|          | • III/c             | 4         | 4         | 8            |
|          | • III/d             | 3         | 5         | 8            |
| <b>3</b> | <b>Golongan II</b>  |           |           |              |
|          | • II/a              | 1         | 0         | 1            |
|          | • II/b              | 1         | 0         | 1            |
|          | • II/c              | 0         | 1         | 1            |
|          | • II/d              | 7         | 8         | 15           |

| No | Golongan/Ruang    | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (L+P) |
|----|-------------------|-----------|-----------|--------------|
| 4  | <b>Golongan I</b> |           |           |              |
|    | • I/d             | 1         | 0         | 1            |
|    | <b>Total</b>      | <b>22</b> | <b>21</b> | <b>43</b>    |

**Tabel 2.3**  
**Jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (L+P) |
|----|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1  | Doktor (S-3)       |           |           |              |
| 2  | Master (S-2)       | 5         | 1         | 6            |
| 3  | Sarjana (S-1/D-IV) | 59        | 40        | 99           |
| 4  | Diploma (D-III)    | 1         | 8         | 9            |
| 5  | Diploma (D-1)      | 2         | 0         | 2            |
| 6  | SMA/Sederajat      | 20        | 9         | 29           |
| 7  | SMP/Sederajat      | 5         | 0         | 5            |
| 8  | SD                 | 1         | 1         | 2            |
|    | <b>Total</b>       | <b>93</b> | <b>59</b> | <b>152</b>   |

Aset/Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terdiri atas gedung kantor, kendaraan roda empat dan roda dua, sarana dan prasarana penunjang lainnya, sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Daftar Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya**

| No | Keterangan                                      | Jumlah | Satuan |
|----|---|--------|--------|
| A  | <b>Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)</b> |        |        |
| 1  | Tanah   | -      | -      |
| 2  | Bangunan  | 1      | Unit   |
| B  | <b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>             |        |        |
| 1  | Kendaraan Roda 4                                | 7      | Unit   |
| 2  | Kendaraan Roda 2                                | 8      | Unit   |
| C  | <b>Aset Lainnya (Peralatan Kantor)</b>          |        |        |
| 1  | AC  | 31     | Unit   |
| 2  | Acces Control Pintu Fingerplus                  | 2      | Unit   |
| 3  | Alat Kantor                                     | 1      | Buah   |
| 4  | Alat Penghancur Kertas                          | 2      | Unit   |

| No | Keterangan   | Jumlah | Satuan |
|----|--|--------|--------|
| 5  | Alat Rumah Tangga  | 1      | Buah   |
| 6  | Alat Survei Kepuasan   | 1      | Unit   |
| 7  | Bangku   |        |        |
| 8  | Bangku Tunggu  | 29     | Unit   |
| 9  | Bangku Tunggu Fiber  | 10     | Unit   |
| 10 | Brangkas   | 1      | Unit   |
| 11 | Buffet Berkas Dinding Interior                                 | 1      | Paket  |
| 12 | Camera/Kamera  |        |        |
| 13 | Camera + Attachment  | 2      | Unit   |
| 14 | Camera CCTV  | 17     | Unit   |
| 15 | Camera CCTV IR Metal Dome + Instalasi Camera + Interface Ke LC | 2      | Unit   |
| 16 | Camera Film  | 2      | Unit   |
| 17 | Camera Thermal (DID TAMBAHAN TAHAP I)                          | 1      | Unit   |
| 18 | CCTV   | 2      | Unit   |
| 19 | CCTV Indoor 2MP  | 1      | Unit   |
| 20 | Indoor IP Camera   | 12     | Unit   |
| 21 | Kamera Digital   | 1      | Unit   |
| 22 | Kamera Digital SLR   | 2      | Unit   |
| 23 | Kamera Saku Digital  | 1      | Unit   |
| 24 | Counter Table dan Background                                   | 2      | Unit   |
| 25 | Decoder 8 Channel  | 1      | Unit   |
| 26 | DIGITAL SIGNAGE 54,5 INCH (DID TAMBAHAN TAHAP I)               | 1      | Unit   |
| 27 | Digital Voice Recorder   | 2      | Unit   |
| 28 | Dispenser  | 6      | Unit   |
| 29 | Dispenser Hot And Cool   | 2      | Unit   |
| 30 | Display Loket Mesin Antrian Termasuk Instalasi                 | 3      | Unit   |
| 31 | Dudukan Sandaran Panjang                                       | 1      | Paket  |
| 32 | DVR CCTV 32 Channel  | 1      | Unit   |
| 33 | FACE ACCESS TERMINAL LCD SCREEN 7 INCH (DID TAMBAHAN TAHAP I)  | 1      | Unit   |
| 34 | Facsimile  | 3      | Unit   |
| 35 | Filling  |        |        |
| 36 | Filling Besi/Metal   | 16     | Unit   |
| 37 | Filling Cabinet  | 2      | Unit   |
| 38 | Filling Cabinet 4 Laci   | 9      | Unit   |
| 39 | Finger Print   | 4      | Unit   |
| 40 | Handheld Metal Detector  | 1      | Unit   |
| 41 | Hard Disk External   | 15     | Unit   |
| 42 | Hard Disk Internal   | 5      | Unit   |
| 43 | HP Z240 WORKSTATION  | 5      | Unit   |
| 44 | HUB 16 Port  | 1      | Unit   |
| 45 | Kerja  | 1      | Unit   |
| 46 | Kios Pelayanan   | 1      | Unit   |
| 47 | Kipas Angin  | 12     | Unit   |
| 48 | Komputer   | 142    | Unit   |
| 49 | Kursi  | 306    | Unit   |
| 50 | Laptop   | 9      | Unit   |

| No | Keterangan   | Jumlah | Satuan |
|----|--|--------|--------|
| 51 | LCD Proyektor  | 5      | Unit   |
| 52 | Lemari   |        |        |
| 53 | Almari Berkas Dinding Interior                               | 3      | Unit   |
| 54 | Lemari Arsip Sliding Pintu Kaca                              | 4      | Unit   |
| 55 | Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis                             | 1      | Unit   |
| 56 | Lemari Berkas  | 17     | Unit   |
| 57 | Lemari Besi/Metal  | 8      | Unit   |
| 58 | Lemari Buku Uk. 170 x 40 180 cm                              | 1      | Unit   |
| 59 | Lemari Es 2 Pintu  | 1      | Unit   |
| 60 | Lemari Es 1 Pintu  | 1      | Unit   |
| 61 | Lemari Gerser  | 1      | Unit   |
| 62 | Lemari Kabinet   | 1      | Paket  |
| 63 | Lemari Kaca  | 6      | Unit   |
| 64 | Lemari Katalog   | 2      | Unit   |
| 65 | Lemari Kayu  | 2      | Unit   |
| 66 | Lemari Pintu Geser (Partisi)                                 | 3      | Unit   |
| 67 | Lemari Pintu Geser (Partisi) (UNTUK KANTOR KETAHANAN PANGAN) | 1      | Unit   |
| 68 | Lemari Sliding Kaca  | 13     | Unit   |
| 69 | Lemari Sorok   | 1      | Unit   |
| 70 | Lemari Storage dan Pantry                                    | 1      | Unit   |
| 71 | Meja   | 120    | Unit   |
| 72 | Mesin Antrian  | 4      | Unit   |
| 73 | Mesin Bor Cordless   | 2      | Unit   |
| 74 | Mesin Faximile   | 1      | Unit   |
| 75 | Mesin Fotocopy   | 1      | Unit   |
| 76 | Mesin Fotocopy Folio   | 1      | Unit   |
| 77 | Mesin Hitung Elektronik                                      | 2      | Unit   |
| 78 | Mesin Ketik  | 3      | Buah   |
| 79 | Mesin Ketik Elektronik                                       | 1      | Unit   |
| 80 | MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON (18-27 INCI)                   | 1      | Unit   |
| 81 | Mesin Numbering  | 2      | Unit   |
| 82 | Mesin Pemotong Rumput  | 1      | Unit   |
| 83 | Mesin Penghancur Kertas Paper Shredder                       | 3      | Unit   |
| 84 | Mesin Printer I 360  | 2      | Unit   |
| 85 | Mic Wireless Headset   | 1      | Unit   |
| 86 | MICROPHONE/WIRELESS MIC                                      | 1      | Unit   |
| 87 | Mini Compo   | 1      | Unit   |
| 88 | MIRROR INSPECTION (72)                                       | 2      | Unit   |
| 89 | Mixer Amplifier  | 2      | Unit   |
| 90 | Monitor  | 4      | Unit   |
| 91 | Notebook   | 4      | Unit   |
| 92 | NVR CCTV 128 Channel   | 1      | Unit   |
| 93 | NVR CCTV 16 CCTV   | 1      | Unit   |
| 94 | Panaboard  | 1      | Unit   |
| 95 | PANTHER  | 1      | Unit   |
| 96 | PAPAN PENGUMUMAN   | 1      | Unit   |
| 97 | PAPAN TULIS ELECTRONIC                                       | 2      | Unit   |

| No           | Keterangan   | Jumlah      | Satuan |
|--------------|--|-------------|--------|
| 98           | PC   | 77          | Unit   |
| 99           | PENGERAS SUARA PORTABLE (USB PORT) (175)                         | 4           | Unit   |
| 100          | PESAWAT TELEPHONE  | 1           | Unit   |
| 101          | Pompa  | 1           | Unit   |
| 102          | POMPA AIR  | 1           | Unit   |
| 103          | POMPA AIR (DID TAMBAHAN TAHAP I)                                 | 1           | Unit   |
| 104          | POMPA AIR BOOSTER (COVID-19)                                     | 1           | Unit   |
| 105          | Pompa Air/Jet Pump 250 watt                                      | 1           | Unit   |
| 106          | PORT HDMI (SPLITTER) (1)   | 1           | Unit   |
| 107          | POWER AMPLIFIER  | 1           | Unit   |
| 108          | POWER SUPPLY ( UPS )   | 3           | Unit   |
| 109          | PRINTER  | 100         | Unit   |
| 110          | PROFESSIONAL SOUND SYSTEM  | 2           | Unit   |
| 111          | RADIO TAPE REKORDER  | 1           | Unit   |
| 112          | RAK BESI/METAL   | 26          | Unit   |
| 113          | ROTATING WIRELESS IP CAMERA BISA DIROTASI (DID TAMBAHAN TAHAP I) | 1           | Unit   |
| 114          | ROUTER WIFI  | 1           | Unit   |
| 115          | SCANNER  | 64          | Unit   |
| 116          | SCREEN   | 1           | Unit   |
| 117          | SCREEN PROJECTOR   | 1           | Unit   |
| 118          | Sedan  | 1           | Unit   |
| 119          | SEPEDA MOTOR   | 8           | Unit   |
| 120          | SHOWCASE   | 1           | Unit   |
| 121          | SOFA   | 1           | Unit   |
| 122          | SOFTWARE APLIKASI CCTV   | 2           | Unit   |
| 123          | SOUND SYSTEM   | 4           | Unit   |
| 124          | Station Wagon  | 3           | Unit   |
| 125          | TABUNG PEMADAM API   | 3           | Unit   |
| 126          | Tandon Air   | 2           | Unit   |
| 127          | Tangga Alumunium   | 3           | Unit   |
| 128          | TELEVISI   | 16          | Unit   |
| 129          | Tombol Pemanggil Mesin Antrian                                   | 16          | Unit   |
| 130          | TOYOTA   | 1           | Unit   |
| 131          | TRIPOD LCD PROJECTOR   | 1           | Unit   |
| 132          | TV MONITOR   | 2           | Unit   |
| 133          | UNIT POWER SUPPLY  | 48          | Unit   |
| 134          | UNITERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)                                | 33          | Unit   |
| 135          | Vacum Cleaner  | 2           | Unit   |
| 136          | WATER PRESSURE PUMP TEST   | 1           | Unit   |
| 137          | Wireless   | 1           | Unit   |
| 138          | Workstation  | 117         | Unit   |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1468</b> |        |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan cara bahwa proses layanan perizinan usaha dilakukan secara elektronik (online) atau yang disebut sebagai SSW (*Surabaya Single Window*) Mobile pada tanggal 14 Maret 2013. Layanan yang disebut sebagai SSW (*Surabaya Single Window*) *Mobile* ini diyakini akan menambah jumlah investasi di Surabaya, dimana pelayanan publik merupakan bagian penting yang menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi dan sekarang dalam tahapan integrasi dengan OSS (Online Single Submission) sebagaimana diamanatkan dalam PP 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha dan untuk menjaga kualitas perizinan berusaha, yang diselenggarakan menggunakan sistem informasi elektronik dari Pemerintah Pusat. .

Keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bagian yang takterpisahkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya juga memberikan gambaran semangat Pemkot Surabaya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, dan transparan, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, dan terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5 (T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah        | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |           |        |      |      | Realisasi |           |          |      |      | Capaian  |          |          |      |      |
|-------|---|-------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------|------|------|-----------|-----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
|       |   |             |            |                             | 2017           | 2018      | 2019   | 2020 | 2021 | 2017      | 2018      | 2019     | 2020 | 2021 | 2017     | 2018     | 2019     | 2020 | 2021 |
|       | <b>Tujuan : Peningkatan sistem manajemen city logistik</b>        | N/A         | ✓          | N/A                         | 5.59%          | 5.59%     | 5.59%  | N/A  | N/A  | 4.89%     | 7.56%     | 7.62%    | N/A  | N/A  | 87.43 %  | 135.26 % | 136.29 % | N/A  | N/A  |
|       | <b>Sasaran : Meningkatnya Investasi Pendukung Logistik</b>        | N/A         | N/A        | N/A                         | 6%             | 12%       | 18%    | N/A  | N/A  | 20.00%    | 20%       | 40.00%   | N/A  | N/A  | 100.00 % | 166.67 % | 222.22 % | N/A  | N/A  |
|       | <b>Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik</b> | N/A         | N/A        | N/A                         | 18%            | 24%       | 30%    | N/A  | N/A  | 50.00 %   | 100%      | 200.00 % | N/A  | N/A  | 277.78 % | 416.67 % | 666.67 % | N/A  | N/A  |
|       | Kegiatan : Temu Usaha Logistik                                    | N/A         | N/A        | N/A                         | 1 kali         | N/A       | N/A    | N/A  | N/A  | 1 kali    | N/A       | N/A      | N/A  | N/A  | 100.00 % | N/A      | N/A      | N/A  | N/A  |
|       | Kegiatan : Temu Usaha Logistik                                    | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 100 orang | N/A    | N/A  | N/A  | N/A       | 100 orang | N/A      | N/A  | N/A  | N/A      | 100.00 % | N/A      | N/A  | N/A  |
|       | Kegiatan : Temu Usaha Fasilitas Pendukung                         | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A       | 1 kali | N/A  | N/A  | N/A       | N/A       | 1 kali   | N/A  | N/A  | N/A      | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A  |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                 | Target NSPK   | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |             |        |        |      | Realisasi |             |         |           |      | Capaian |          |          |          |      |     |
|-------|--|---|------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------|--------|------|-----------|-------------|---------|-----------|------|---------|----------|----------|----------|------|-----|
|       |  |   |            |                             | 2017           | 2018        | 2019   | 2020   | 2021 | 2017      | 2018        | 2019    | 2020      | 2021 | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     | 2021 |     |
|       | g Logistik   |   |            |                             |                |             |        |        |      |           |             |         |           |      |         |          |          |          |      |     |
|       | <b>Tujuan :<br/>Meningkatkan realisasi PMA, PMDN, dan Investasi Daerah</b> | Rata- rata pertumbuhan nilai realisasi investasi                | N/A        | ✓                           | N/A            | 5%          | 5%     | 5%     | N/A  | N/A       | 11.88%      | 5.49%   | 21.57%    | N/A  | N/A     | 237.55 % | 109.71 % | 431.46 % | N/A  | N/A |
|       | <b>Sasaran :<br/>Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi</b>               | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                    | N/A        | N/A                         | N/A            | 21ijin      | 22ijin | 22ijin | N/A  | N/A       | 44.00ijin   | 122ijin | 47.00ijin | N/A  | N/A     | 209.52 % | 554.55 % | 213.64 % | N/A  | N/A |
|       | <b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi</b>                   | Tingkat pertumbuhanijin realisasi investasi                     | N/A        | N/A                         | N/A            | 8%          | 12%    | 16%    | N/A  | N/A       | 14.16 %     | 20.59%  | 27.89%    | N/A  | N/A     | 177.06 % | 171.61 % | 174.3%   | N/A  | N/A |
|       |  | Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi          | N/A        | N/A                         | N/A            | 12%         | 18%    | 24%    | N/A  | N/A       | 80.49 %     | 65.85%  | 89.02%    | N/A  | N/A     | 670.73 % | 365.85 % | 370.93 % | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal                       | Jumlah Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan | N/A        | N/A                         | N/A            | 2 kali      | N/A    | N/A    | N/A  | N/A       | 2 kali      | N/A     | N/A       | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A      | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya                       | Jumlah pelaku usahayang dipetakan                               | N/A        | N/A                         | N/A            | 244 lembaga | N/A    | N/A    | N/A  | N/A       | 244 lembaga | N/A     | N/A       | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A      | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Pengendal  | Jumlah laporan  | N/A        | N/A                         | N/A            | 4 doku      | N/A    | N/A    | N/A  | N/A       | 4 dokume    | N/A     | N/A       | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A      | N/A  | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah      | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |                |      |      |      | Realisasi |           |                |      |      | Capaian |          |          |      |      |     |
|-------|---|-------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|------|------|------|-----------|-----------|----------------|------|------|---------|----------|----------|------|------|-----|
|       |   |             |            |                             | 2017           | 2018           | 2019 | 2020 | 2021 | 2017      | 2018      | 2019           | 2020 | 2021 | 2017    | 2018     | 2019     | 2020 | 2021 |     |
|       | ian Penanaman Modal   |             |            |                             | men            |                |      |      |      |           | n         |                |      |      |         |          |          |      |      |     |
|       | Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Investasi                    | N/A         | N/A        | N/A                         | 5 kali         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | 5 kali    | N/A            | N/A  | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya | N/A         | N/A        | N/A                         | 1 dokumen      | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | 1 dokumen | N/A            | N/A  | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi             | N/A         | N/A        | N/A                         | 4 dokumen      | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | 4 dokumen | N/A            | N/A  | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Promosi Investasi             | N/A         | N/A        | N/A                         | 1 kali         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | 1 kali    | N/A            | N/A  | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya               | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 500 perusahaan | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A       | 500 perusahaan | N/A  | N/A  | N/A     | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Penyusunan   | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 3 dokum        | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A       | 3 dokumen      | N/A  | N/A  | N/A     | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A  | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah        | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |                  |      |      |      | Realisasi |                  |      |      |      | Capaian |          |      |      |      |     |
|-------|---|-------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------|------|------|------|-----------|------------------|------|------|------|---------|----------|------|------|------|-----|
|       |   |             |            |                             | 2017           | 2018             | 2019 | 2020 | 2021 | 2017      | 2018             | 2019 | 2020 | 2021 | 2017    | 2018     | 2019 | 2020 | 2021 |     |
|       | an Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya      |             |            |                             |                | en               |      |      |      |           |                  |      |      |      |         |          |      |      |      |     |
|       | Kegiatan : Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 100 orang        | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | 105 orang        | N/A  | N/A  | N/A  | N/A     | 105.00 % | N/A  | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal                   | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 375 perusahaan   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | 347 perusahaan   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A     | 92.53%   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Monitoring Penanaman Modal                             | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 2750 perusahaan  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | 2750 perusahaan  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A  | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Pengelolaan Data Investasi                             | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 33729 perusahaan | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | 38583 perusahaan | N/A  | N/A  | N/A  | N/A     | 114.39 % | N/A  | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Pendampingan Perusahaan                                | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 396 perusahaan   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | 396 perusahaan   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A  | N/A  | N/A  | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah         | Target NSPK   | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |      |            |              |      | Realisasi |      |            |              |      | Capaian |      |          |          |      |     |     |
|-------|--|---|------------|-----------------------------|----------------|------|------------|--------------|------|-----------|------|------------|--------------|------|---------|------|----------|----------|------|-----|-----|
|       |  |   |            |                             | 2017           | 2018 | 2019       | 2020         | 2021 | 2017      | 2018 | 2019       | 2020         | 2021 | 2017    | 2018 | 2019     | 2020     | 2021 |     |     |
|       | n Penanaman Modal  | didampingi  |            |                             |                |      |            |              |      |           |      |            |              |      |         |      |          |          |      |     |     |
|       | Kegiatan :<br>Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | 10 lembaga | N/A          | N/A  | N/A       | N/A  | 11 lembaga | N/A          | N/A  | N/A     | N/A  | 110.00 % | N/A      | N/A  | N/A | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Penyelenggaraan Promosi Investasi                    | Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan                                    | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | 3 kali     | N/A          | N/A  | N/A       | N/A  | 3 kali     | N/A          | N/A  | N/A     | N/A  | 100.00 % | N/A      | N/A  | N/A | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal               | Jumlah koordinasi perencanaan penanaman modal yang dilaksanakan               | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A        | 1 kali       | N/A  | N/A       | N/A  | N/A        | 1 kali       | N/A  | N/A     | N/A  | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya               | Jumlah pelaku usahayang dipetakan   | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A        | 500 lembaga  | N/A  | N/A       | N/A  | N/A        | 500 lembaga  | N/A  | N/A     | N/A  | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal              | Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dandievaluasi                  | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A        | 2800 lembaga | N/A  | N/A       | N/A  | N/A        | 2800 lembaga | N/A  | N/A     | N/A  | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Penyeleng  | Jumlah promosi  | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A        | 3 kali       | N/A  | N/A       | N/A  | N/A        | 3 kali       | N/A  | N/A     | N/A  | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                      | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |      |      |             |      | Realisasi |        |        |             |      | Capaian |          |          |          |      |     |  |
|-------|---|-------------|------------|-----------------------------|----------------|------|------|-------------|------|-----------|--------|--------|-------------|------|---------|----------|----------|----------|------|-----|--|
|       |   |             |            |                             | 2017           | 2018 | 2019 | 2020        | 2021 | 2017      | 2018   | 2019   | 2020        | 2021 | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     | 2021 |     |  |
|       | garaan Promosi Investasi  |             |            |                             |                |      |      |             |      |           |        |        |             |      |         |          |          |          |      |     |  |
|       | Kegiatan : Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | 3 dokumen   | N/A  | N/A       | N/A    | N/A    | 3 dokumen   | N/A  | N/A     | N/A      | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A |  |
|       | Kegiatan : Pengelolaan Data Investasi   | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | 34403 data  | N/A  | N/A       | N/A    | N/A    | 41400 data  | N/A  | N/A     | N/A      | N/A      | 120.34 % | N/A  | N/A |  |
|       | Kegiatan : Pembinaan PMA dan PMDN   | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | 200 lembaga | N/A  | N/A       | N/A    | N/A    | 205 lembaga | N/A  | N/A     | N/A      | N/A      | 102.50 % | N/A  | N/A |  |
|       | Kegiatan : Pendampingan PMA dan PMDN  | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | 400 lembaga | N/A  | N/A       | N/A    | N/A    | 400 lembaga | N/A  | N/A     | N/A      | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A |  |
|       | Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal                 | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | 12 kali     | N/A  | N/A       | N/A    | N/A    | 12 kali     | N/A  | N/A     | N/A      | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A |  |
|       | <b>Tujuan : Meningkatkan</b>  | N/A         | ✓          | N/A                         | 76%            | 76%  | 76%  | N/A         | N/A  | 75.30%    | 83.69% | 85.18% | N/A         | N/A  | 99.08 % | 110.11 % | 112.08 % | N/A      | N/A  |     |  |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK  | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |             |       |      |      | Realisasi |             |        |        |      | Capaian |          |          |          |      |     |
|-------|--|--|------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------|------|------|-----------|-------------|--------|--------|------|---------|----------|----------|----------|------|-----|
|       |  |  |            |                             | 2017           | 2018        | 2019  | 2020 | 2021 | 2017      | 2018        | 2019   | 2020   | 2021 | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     | 2021 |     |
|       | kualitas pelayanan publik                                  | Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan  |            |                             |                |             |       |      |      |           |             |        |        |      |         |          |          |          |      |     |
|       | Sasaran : Meningkatkan Kualitas pelayanan perijinan        | Indeks kepuasan layanan masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi                   | N/A        | N/A                         | N/A            | 73%         | 73.5% | 74%  | N/A  | N/A       | 79.68%      | 86.29% | 80.05% | N/A  | N/A     | 100.00 % | 117.4%   | 108.18 % | N/A  | N/A |
|       | Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan              | Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan                                   | N/A        | N/A                         | N/A            | 72%         | 74%   | 76%  | N/A  | N/A       | 74.33 %     | 84.05% | 86.37% | N/A  | N/A     | 103.24 % | 113.58 % | 113.65 % | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Bintek Penyusunan Informasi Industri            | Jumlah UKM yang mengikuti bintek Informasi Industri  | N/A        | N/A                         | N/A            | 300 orang   | N/A   | N/A  | N/A  | N/A       | 219 orang   | N/A    | N/A    | N/A  | N/A     | 73.00 %  | N/A      | N/A      | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Pelayanan Perizinan Penanaman Modal             | Jumlah perusahaan PMA/PMDN dan UMKM yang memperoleh fasilitasi pelayanan perijinan penanaman modal | N/A        | N/A                         | N/A            | 100 lembaga | N/A   | N/A  | N/A  | N/A       | 100 lembaga | N/A    | N/A    | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A      | N/A  | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                                    | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |        |      |      |      | Realisasi    |        |      |      |      | Capaian  |       |      |      |      |
|-------|---|-------------|------------|-----------------------------|----------------|--------|------|------|------|--------------|--------|------|------|------|----------|-------|------|------|------|
|       |   |             |            |                             | 2017           | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2017         | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2017     | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|       | Kegiatan Pelayanan PTSP   | N/A         | N/A        | N/A                         | 60000 berkas   | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | 67746 berkas | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | 112.91 % | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  |
|       | Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                    | N/A         | N/A        | N/A                         | 130 orang      | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | 87 orang     | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | 66.92 %  | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  |
|       | Kegiatan : Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan  | N/A         | N/A        | N/A                         | 500 orang      | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | 517 orang    | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | 103.40 % | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  |
|       | Kegiatan : Pengawasan Perijinan di Bidang Industri  | N/A         | N/A        | N/A                         | 73 dokumen     | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | 72 dokumen   | N/A    | N/A  | N/A  | N/A  | 98.63 %  | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  |
|       | Kegiatan : Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangandi Bidang Cukai Kepada | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 4 kali | N/A  | N/A  | N/A  | N/A          | 0 kali | N/A  | N/A  | N/A  | N/A      | 0.00% | N/A  | N/A  | N/A  |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah       | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |                    |      |      |      | Realisasi |      |                    |      |      | Capaian |      |          |      |      |     |     |
|-------|--|-------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------|------|------|-----------|------|--------------------|------|------|---------|------|----------|------|------|-----|-----|
|       |  |             |            |                             | 2017           | 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | 2017      | 2018 | 2019               | 2020 | 2021 | 2017    | 2018 | 2019     | 2020 | 2021 |     |     |
|       | Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)                |             |            |                             |                |                    |      |      |      |           |      |                    |      |      |         |      |          |      |      |     |     |
|       | Kegiatan : Pelayanan Perizinan Penanaman Modal                   | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 100 perusahaan     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 100 perusahaan     | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 100.00 % | N/A  | N/A  | N/A | N/A |
|       | Kegiatan : Pengawasan Perijinan                                  | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 10340 pelaku usaha | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 11191 pelaku usaha | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 108.23 % | N/A  | N/A  | N/A | N/A |
|       | Kegiatan : Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 260 orang          | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 265 orang          | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 101.92 % | N/A  | N/A  | N/A | N/A |
|       | Kegiatan : Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan                     | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 500 pelaku usaha   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 554 pelaku usaha   | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 110.80 % | N/A  | N/A  | N/A | N/A |
|       | Kegiatan : Bimtek Penyusunan Informasi Industri                  | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 200 orang          | N/A  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 217 orang          | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 108.50 % | N/A  | N/A  | N/A | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |            |           |      |      | Realisasi |      |             |      |      | Capaian |      |          |      |      |     |
|-------|---|-------------|------------|-----------------------------|----------------|------------|-----------|------|------|-----------|------|-------------|------|------|---------|------|----------|------|------|-----|
|       |   |             |            |                             | 2017           | 2018       | 2019      | 2020 | 2021 | 2017      | 2018 | 2019        | 2020 | 2021 | 2017    | 2018 | 2019     | 2020 | 2021 |     |
|       | Industri  |             |            |                             |                |            |           |      |      |           |      |             |      |      |         |      |          |      |      |     |
|       | Kegiatan Pelayanan PTSP   | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 67000 ijin | N/A       | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 112218 ijin | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 167.49 % | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)  | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 2 kali     | N/A       | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 0 kali      | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 0.00%    | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Pendataan dan pengawasan kepemilikan / penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 1 kali     | N/A       | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 0 kali      | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 0.00%    | N/A  | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Bimtek Penyusunan  | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A        | 300 orang | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 300 orang   | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 100.00 % | N/A  | N/A  | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah               | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |      |              |      |      | Realisasi |      |               |      |      | Capaian |      |          |      |      |  |
|-------|--|-------------|------------|-----------------------------|----------------|------|--------------|------|------|-----------|------|---------------|------|------|---------|------|----------|------|------|--|
|       |  |             |            |                             | 2017           | 2018 | 2019         | 2020 | 2021 | 2017      | 2018 | 2019          | 2020 | 2021 | 2017    | 2018 | 2019     | 2020 | 2021 |  |
|       | Laporan Industri   |             |            |                             |                |      |              |      |      |           |      |               |      |      |         |      |          |      |      |  |
|       | Kegiatan : Bimtek Perizinan Penanaman Modal                              | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | 100 lembaga  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 100 lembaga   | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 100.00 % | N/A  | N/A  |  |
|       | Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu     | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | 90000 berkas | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 117456 berkas | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 130.51 % | N/A  | N/A  |  |
|       | Kegiatan : Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | 100 orang    | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 100 orang     | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 100.00 % | N/A  | N/A  |  |
|       | Kegiatan : Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan                             | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | 550 orang    | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 550 orang     | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 100.00 % | N/A  | N/A  |  |
|       | Kegiatan : Pengawasan Perijinan  | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | 10300 orang  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 10315 orang   | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 100.15 % | N/A  | N/A  |  |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |      |         |      |      | Realisasi |      |         |      |      | Capaian |      |          |      |      |  |
|-------|---|-------------|------------|-----------------------------|----------------|------|---------|------|------|-----------|------|---------|------|------|---------|------|----------|------|------|--|
|       |   |             |            |                             | 2017           | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 | 2017      | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 | 2017    | 2018 | 2019     | 2020 | 2021 |  |
|       | Industri dan TandaDaftar Perusahaan   |             |            |                             |                |      |         |      |      |           |      |         |      |      |         |      |          |      |      |  |
|       | Kegiatan : Koordinasi Teknis Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu   | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | 24 kali | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 24 kali | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 100.00 % | N/A  | N/A  |  |
|       | Kegiatan : Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangandi Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT) | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | 4 kali  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 4 kali  | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 100.00 % | N/A  | N/A  |  |
|       | Kegiatan : Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)  | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | 2 kali  | N/A  | N/A  | N/A       | N/A  | 2 kali  | N/A  | N/A  | N/A     | N/A  | 100.00 % | N/A  | N/A  |  |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah   | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |         |        |      |      | Realisasi |        |          |      |      | Capaian  |          |          |      |      |
|-------|--|-------------|------------|-----------------------------|----------------|---------|--------|------|------|-----------|--------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
|       |  |             |            |                             | 2017           | 2018    | 2019   | 2020 | 2021 | 2017      | 2018   | 2019     | 2020 | 2021 | 2017     | 2018     | 2019     | 2020 | 2021 |
|       | Kegiatan :<br>Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT) | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A     | 1 kali | N/A  | N/A  | N/A       | N/A    | 1 kali   | N/A  | N/A  | N/A      | N/A      | 100.00 % | N/A  | N/A  |
|       | <b>Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik</b>   | N/A         | ✓          | N/A                         | 62%            | 64%     | 66%    | N/A  | N/A  | 67.64%    | 78.26% | 82.65%   | N/A  | N/A  | 109.10 % | 122.28 % | 125.23 % | N/A  | N/A  |
|       | Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program   | N/A         | ✓          | N/A                         | 90.84 %        | 91.53 % | 91.96% | N/A  | N/A  | 100.00 %  | 100%   | 100.00 % | N/A  | N/A  | 110.08 % | 109.25 % | 108.74 % | N/A  | N/A  |
|       | Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan   | N/A         | ✓          | N/A                         | 76%            | 77%     | 78%    | N/A  | N/A  | 75.30%    | 79.41% | 82.61%   | N/A  | N/A  | 99.08 %  | 103.13 % | 105.91 % | N/A  | N/A  |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Target NSPK   | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |           |            |      |      | Realisasi |           |            |          |      | Capaian |          |          |          |      |     |
|-------|---|---|------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------|------|------|-----------|-----------|------------|----------|------|---------|----------|----------|----------|------|-----|
|       |   |   |            |                             | 2017           | 2018      | 2019       | 2020 | 2021 | 2017      | 2018      | 2019       | 2020     | 2021 | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     | 2021 |     |
|       | <b>Sasaran : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program</b> | Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan     | N/A        | N/A                         | N/A            | 100%      | 100%       | 100% | N/A  | N/A       | 100.00 %  | 100%       | 100.00 % | N/A  | N/A     | 100.00 % | 100%     | 100.00 % | N/A  | N/A |
|       | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>   | Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral | N/A        | N/A                         | N/A            | 100%      | 100%       | 100% | N/A  | N/A       | 100.00 %  | 100%       | 100.00 % | N/A  | N/A     | 100.00 % | 100%     | 100%     | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis  | Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis  | N/A        | N/A                         | N/A            | 9 dokumen | N/A        | N/A  | N/A  | N/A       | 9 dokumen | N/A        | N/A      | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A      | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun                | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A       | 12 Dokumen | N/A  | N/A  | N/A       | N/A       | 12 Dokumen | N/A      | N/A  | N/A     | N/A      | 100.00 % | N/A      | N/A  | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Target NSPK   | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |         |       |      |      | Realisasi |          |         |        |      | Capaian |          |          |          |      |     |
|-------|---|---|------------|-----------------------------|----------------|---------|-------|------|------|-----------|----------|---------|--------|------|---------|----------|----------|----------|------|-----|
|       |   |   |            |                             | 2017           | 2018    | 2019  | 2020 | 2021 | 2017      | 2018     | 2019    | 2020   | 2021 | 2017    | 2018     | 2019     | 2020     | 2021 |     |
|       | <b>Sasaran :<br/>Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah</b> | Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah            | N/A        | N/A                         | N/A            | 100%    | 100%  | 100% | N/A  | N/A       | 100.00 % | N/A     | N/A    | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A      | N/A  | N/A |
|       |   | Persentase kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah | N/A        | N/A                         | N/A            | 100%    | 100%  | 100% | N/A  | N/A       | 100.00 % | 100%    | 99.38% | N/A  | N/A     | 100.00 % | 100%     | 99.38%   | N/A  | N/A |
|       | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>   | Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran                            | N/A        | N/A                         | N/A            | 72%     | 74%   | 76%  | N/A  | N/A       | 72.67 %  | 78.97%  | 82.76% | N/A  | N/A     | 100.93 % | 106.72 % | 108.89 % | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah                               | Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan  | N/A        | N/A                         | N/A            | 9 jenis | N/A   | N/A  | N/A  | N/A       | 9 jenis  | N/A     | N/A    | N/A  | N/A     | 100.00 % | N/A      | N/A      | N/A  | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Penyediaan Barang   | Persentase ketersediaan barang dan  | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A     | 100 % | N/A  | N/A  | N/A       | N/A      | 271.1 % | N/A    | N/A  | N/A     | N/A      | 271.10 % | N/A      | N/A  | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |         |       |      |      | Realisasi |          |        |      |      | Capaian  |          |        |          |      |     |  |
|-------|---|-------------|------------|-----------------------------|----------------|---------|-------|------|------|-----------|----------|--------|------|------|----------|----------|--------|----------|------|-----|--|
|       |   |             |            |                             | 2017           | 2018    | 2019  | 2020 | 2021 | 2017      | 2018     | 2019   | 2020 | 2021 | 2017     | 2018     | 2019   | 2020     | 2021 |     |  |
|       | dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah                                     |             |            |                             |                |         |       |      |      |           |          |        |      |      |          |          |        |          |      |     |  |
|       | Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah        | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A     | 100 % | N/A  | N/A  | N/A       | N/A      | 100 %  | N/A  | N/A  | N/A      | N/A      | N/A    | 100.00 % | N/A  | N/A |  |
|       | <b>Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan</b> | N/A         | N/A        | N/A                         | 100%           | 100%    | 100%  | N/A  | N/A  | 100.00 %  | 100%     | 98.81% | N/A  | N/A  | 100.00 % | 100%     | 98.81% | N/A      | N/A  |     |  |
|       | Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran    | N/A         | N/A        | N/A                         | 144 unit       | N/A     | N/A   | N/A  | N/A  | 144 unit  | N/A      | N/A    | N/A  | N/A  | 100.00 % | N/A      | N/A    | N/A      | N/A  | N/A |  |
|       | Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran                  | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | 70 unit | N/A   | N/A  | N/A  | N/A       | 189 unit | N/A    | N/A  | N/A  | N/A      | 270.00 % | N/A    | N/A      | N/A  | N/A |  |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                  | Target NSPK   | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |      |      |       |                      | Realisasi            |      |      |       |                        | Capaian |      |      |      |          |             |     |
|-------|---|---|------------|-----------------------------|----------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|------|------|-------|------------------------|---------|------|------|------|----------|-------------|-----|
|       |   |   |            |                             | 2017           | 2018 | 2019 | 2020  | 2021                 | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021                   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     |             |     |
|       |   |   |            |                             |                |      |      |       |                      |                      |      |      |       |                        |         |      |      |      |          |             |     |
|       | Kegiatan :<br>Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran                 | Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran            | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | 100 % | N/A                  | N/A                  | N/A  | N/A  | 100 % | N/A                    | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | 100.00 % | N/A         | N/A |
|       | <b>Tujuan :<br/>Meningkatkan realisasi investasi</b>                        | Nilai Realisasi Investasi   | N/A        | ✓                           | N/A            | N/A  | N/A  | N/A   | Rp63.637.817.362.390 | Rp74.719.784.275.973 | N/A  | N/A  | N/A   | 64081289710388.7rupiah | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A      | 100.7rupiah | N/A |
|       | <b>Sasaran :<br/>Meningkatkan realisasi PMA, PMDN, dan Investasi Daerah</b> | Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi                     | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A   | 20%                  | 24%                  | N/A  | N/A  | N/A   | 24.87%                 | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A      | 124.34%     | N/A |
|       | <b>Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal</b>             | Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuatLKPM | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A   | 40,00%               | 42,00 %              | N/A  | N/A  | N/A   | 42.21%                 | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A      | 105.54%     | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal      | Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi       | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A   | 3500 perusahaan      | 3500 perusahaan      | N/A  | N/A  | N/A   | 2102 perusahaan        | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A      | 100.10%     | N/A |
|       | Kegiatan :<br>Pengelola   | Jumlah data investasi yang  | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A   | 41751 data           | 45151 data           | N/A  | N/A  | N/A   | 44839 data             | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A      | 107.40%     | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                          | Target NSPK  | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |      |      |      |           | Realisasi |      |      |      |           | Capaian |      |      |      |      |         |     |
|-------|---|--|------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|---------|-----|
|       |   |  |            |                             | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021      | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021      | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |         |     |
|       | an Data Investasi   | dikelola   |            |                             |                |      |      |      |           |           |      |      |      |           |         |      |      |      |      |         |     |
|       | <b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi</b>                            | Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi   | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 20,00%    | 24,00%    | N/A  | N/A  | N/A  | 24.9%     | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 124.51% | N/A |
|       | Kegiatan : Pengembangan Potensi Penanaman Modal                                     | Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal  | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 4 dokumen | N/A       | N/A  | N/A  | N/A  | 9 dokumen | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 112.50% | N/A |
|       | Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Investasi  | Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan   | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 3 kali    | 3 kali    | N/A  | N/A  | N/A  | 2 kali    | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100.00% | N/A |
|       | <b>Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>      | Nilai SAKIP  | N/A        | ✓                           | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | >70-80    | >80-90    | N/A  | N/A  | N/A  | 76.94     | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100     | N/A |
|       | <b>Sasaran : Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan</b> | Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 100%      | 100%      | N/A  | N/A  | N/A  | 99.97%    | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 99.97%  | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                | Target NSPK  | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |      |      |      |          | Realisasi |      |      |      |        | Capaian |      |      |      |         |     |
|-------|---|--|------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|----------|-----------|------|------|------|--------|---------|------|------|------|---------|-----|
|       |   |  |            |                             | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021    |     |
|       | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                         | Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 87,00 %  | 88,00 %   | N/A  | N/A  | N/A  | 88.12% | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | 101.29% | N/A |
|       | Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah        | Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran                  | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 100 %    | 100 %     | N/A  | N/A  | N/A  | 100 %  | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | 100.00% | N/A |
|       | <b>Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan</b> | Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran      | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 100,00 % | 100,00 %  | N/A  | N/A  | N/A  | 100%   | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | 100%    | N/A |
|       |   | Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik       | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 100,00 % | 100,00 %  | N/A  | N/A  | N/A  | 99.93% | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | 99.93%  | N/A |
|       | Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran                  | Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran             | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 100 %    | 100 %     | N/A  | N/A  | N/A  | 100 %  | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | 100.00% | N/A |
|       | <b>Tujuan :</b>   | Nilai  | N/A        | ✓                           | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 86,03%   | 88,31     | N/A  | N/A  | N/A  | 86.05% | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | 100.02% | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                        | Target NSPK  | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |      |      |      |        | Realisasi |      |      |      |        | Capaian |      |      |      |      |         |     |
|-------|---|--|------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|--------|-----------|------|------|------|--------|---------|------|------|------|------|---------|-----|
|       |   |  |            |                             | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021   | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |         |     |
|       | Meningkatkan kualitas pelayanan publik  | Kepuasan Masyarakat  |            |                             |                |      |      |      |        | %         |      |      |      |        |         |      |      |      |      |         |     |
|       |   |  | N/A        | N/A                         | N/A            |      |      |      |        |           |      |      |      |        |         |      |      |      |      |         |     |
|       | Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik                                  | Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 78     | 80        | N/A  | N/A  | N/A  | 100%   | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 128.21% | N/A |
|       | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal | Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya        | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 72,00% | 75,00 %   | N/A  | N/A  | N/A  | 75.1%  | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 104.31% | N/A |
|       |   | Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 78,00% | 80,00 %   | N/A  | N/A  | N/A  | 100%   | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 128.21% | N/A |
|       | Kegiatan : Pendataan dan Pengawas   | Jumlah pendataan dan pengawasan  | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 2 kali | 2 kali    | N/A  | N/A  | N/A  | 2 kali | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100.00% | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah   | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |      |      |      |                    | Realisasi          |      |      |      |                    | Capaian |      |      |      |      |         |     |
|-------|--|-------------|------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|--------------------|--------------------|------|------|------|--------------------|---------|------|------|------|------|---------|-----|
|       |  |             |            |                             | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021               | 2017               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021               | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |         |     |
|       | an Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT) |             |            |                             |                |      |      |      |                    |                    |      |      |      |                    |         |      |      |      |      |         |     |
|       | Kegiatan : Pengawasan Perizinan Industri dan SIUP  | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 11000 pelaku usaha | 11000 pelaku usaha | N/A  | N/A  | N/A  | 12509 pelaku usaha | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 108.77% | N/A |
|       | Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu   | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 60000 berkas       | 60000 berkas       | N/A  | N/A  | N/A  | 94367 berkas       | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 157.28% | N/A |
|       | Kegiatan : Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)   | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 2 kali             | 2 kali             | N/A  | N/A  | N/A  | 2 kali             | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100.00% | N/A |
|       | Kegiatan :   | N/A         | N/A        | N/A                         | N/A            | N/A  | N/A  | N/A  | 4 kali             | 5 kali             | N/A  | N/A  | N/A  | 4 kali             | N/A     | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100.00% | N/A |

| Level | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah   | Target NSPK  | Target IKK | Target Indikator or Lainnya | Target Kinerja |      |      |      |      | Realisasi |      |      |      |      | Capaian |      |      |      |      |
|-------|--|--|------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
|       |  |  |            |                             | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|       | Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangandi Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT) | penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan |            |                             |                |      |      |      |      |           |      |      |      |      |         |      |      |      |      |

Tabel 2.6 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

| Uraian   | Anggaran      |               |               |               |      | Realisasi Anggaran |               |               |               |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran |        |        |        |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------|-----------|
|  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021 | 2017               | 2018          | 2019          | 2020          | 2021 | 2017                                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 | Anggaran              | Realisasi |
| Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi                  | 3,440,262,915 | 5,019,849,238 | 3,665,355,499 | N/A           | N/A  | 3,273,236,108      | 4,597,794,383 | 3,237,238,493 | N/A           | N/A  | 95.14%                              | 91.59% | 88.32% | N/A    | N/A  | 3.27%                 | -0.55%    |
| Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik         | 380,236,400   | 220,566,434   | 171,890,607   | N/A           | N/A  | 368,074,093        | 215,974,691   | 154,536,154   | N/A           | N/A  | 96.80%                              | 97.92% | 89.90% | N/A    | N/A  | -27.40%               | -29.01%   |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah                             | 145,512,504   | 173,892,917   | 0             | N/A           | N/A  | 137,221,096        | 147,308,955   | 0             | N/A           | N/A  | 94.30%                              | 84.71% | 0.00%  | N/A    | N/A  | -50.00%               | -50.00%   |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                         | 1,677,963,390 | 1,670,073,332 | 1,971,840,563 | N/A           | N/A  | 1,474,692,585      | 1,436,003,202 | 1,845,977,145 | N/A           | N/A  | 87.89%                              | 85.98% | 93.62% | N/A    | N/A  | 8.76%                 | 12.59%    |
| Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                      | 6,280,079,163 | 7,526,176,130 | 7,377,049,893 | N/A           | N/A  | 5,819,611,338      | 7,033,488,471 | 6,842,031,162 | N/A           | N/A  | 92.67%                              | 93.45% | 92.75% | N/A    | N/A  | 8.73%                 | 8.78%     |
| Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan | 326,464,393   | 375,496,004   | 895,863,464   | N/A           | N/A  | 276,969,871        | 311,973,379   | 739,630,554   | N/A           | N/A  | 84.84%                              | 83.08% | 82.56% | N/A    | N/A  | 87.21%                | 83.52%    |
| Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan                        | N/A           | N/A           | N/A           | 5,754,737,487 | N/A  | N/A                | N/A           | N/A           | 5,588,767,967 | N/A  | N/A                                 | N/A    | N/A    | 97.12% | N/A  | -                     | -         |

| Uraian  | Anggaran |      |      |               |            | Realisasi Anggaran |      |      |               |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran |      |      |        |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---|----------|------|------|---------------|------------|--------------------|------|------|---------------|------|-------------------------------------|------|------|--------|------|-----------------------|-----------|
|   | 2017     | 2018 | 2019 | 2020          | 2021       | 2017               | 2018 | 2019 | 2020          | 2021 | 2017                                | 2018 | 2019 | 2020   | 2021 | Anggaran              | Realisasi |
| Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal                               |          |      |      |               |            |                    |      |      |               |      |                                     |      |      |        |      |                       |           |
| Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi                   | N/A      | N/A  | N/A  | 1,236,033,735 | N/A        | N/A                | N/A  | N/A  | 1,138,045,294 | N/A  | N/A                                 | N/A  | N/A  | 92.07% | N/A  | -                     | -         |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                          | N/A      | N/A  | N/A  | 1,768,842,916 | N/A        | N/A                | N/A  | N/A  | 1,617,562,860 | N/A  | N/A                                 | N/A  | N/A  | 91.45% | N/A  | -                     | -         |
| Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal            | N/A      | N/A  | N/A  | 1,189,112,858 | N/A        | N/A                | N/A  | N/A  | 1,134,072,721 | N/A  | N/A                                 | N/A  | N/A  | 95.37% | N/A  | -                     | -         |
| Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan  | N/A      | N/A  | N/A  | 769,925,057   | N/A        | N/A                | N/A  | N/A  | 699,968,751   | N/A  | N/A                                 | N/A  | N/A  | 90.91% | N/A  | -                     | -         |
| Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik                 | N/A      | N/A  | N/A  | N/A           | 23,296,619 | N/A                | N/A  | N/A  | N/A           | -    | N/A                                 | N/A  | N/A  | N/A    | -    | -                     | -         |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | N/A      | N/A  | N/A  | N/A           | 11,772,125 | N/A                | N/A  | N/A  | N/A           | -    | N/A                                 | N/A  | N/A  | N/A    | -    | -                     | -         |

| Uraian  | Anggaran |      |      |      |                | Realisasi Anggaran |      |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---|----------|------|------|------|----------------|--------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|   | 2017     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021           | 2017               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |
| Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | N/A      | N/A  | N/A  | N/A  | 390,403,592    | N/A                | N/A  | N/A  | N/A  | -    | N/A                                 | N/A  | N/A  | N/A  | -    | -                     | -         |
| Program Promosi Penanaman Modal                               | N/A      | N/A  | N/A  | N/A  | 534,650,666    | N/A                | N/A  | N/A  | N/A  | -    | N/A                                 | N/A  | N/A  | N/A  | -    | -                     | -         |
| Program Perekonomian Dan Pembangunan                          | N/A      | N/A  | N/A  | N/A  | 1,683,202,349  | N/A                | N/A  | N/A  | N/A  | -    | N/A                                 | N/A  | N/A  | N/A  | -    | -                     | -         |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | N/A      | N/A  | N/A  | N/A  | 532,427,102    | N/A                | N/A  | N/A  | N/A  | -    | N/A                                 | N/A  | N/A  | N/A  | -    | -                     | -         |
| Program Pelayanan Penanaman Modal                             | N/A      | N/A  | N/A  | N/A  | 3,781,811,018  | N/A                | N/A  | N/A  | N/A  | -    | N/A                                 | N/A  | N/A  | N/A  | -    | -                     | -         |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | N/A      | N/A  | N/A  | N/A  | 12,454,447,272 | N/A                | N/A  | N/A  | N/A  | -    | N/A                                 | N/A  | N/A  | N/A  | -    | -                     | -         |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | N/A      | N/A  | N/A  | N/A  | 1,509,492,751  | N/A                | N/A  | N/A  | N/A  | -    | N/A                                 | N/A  | N/A  | N/A  | -    | -                     | -         |

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah (PD) pada lima tahun mendatang.

Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta analisis Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah dilakukan berkaitan dengan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah. Hasil analisis RTRW dan KLHS tidak disajikan dalam bagian ini karena pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tidak terkait dengan lokasi/penempatan fasilitas tertentu atau diatur dalam ketentuan penataan ruang serta lingkungan hidup, sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan data spasial lainnya terkait tugas dan fungsi/pelayanan/wilayah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Setiap Kementerian/Lembaga, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki sasaran strategis yang perumusannya menyesuaikan dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Setelah mempertimbangkan berbagai hal tersebut, BKPM memiliki sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Hasil telaah tantangan dan peluang yang dilakukan terhadap Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 tampak pada tabel 2.7

**Tabel 2.7**  
**Pemetaan Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

| Sasaran Renstra K/L dan Provinsi                                   | Permasalahan Pelayanan ( <i>Existing</i> ) di PD yang berkaitan dengan Renstra K/L  | Ancaman / Tantangan   | Peluang  |
|--|---|---|--|
| <b>Sasaran Strategis Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal</b>  |   |   |  |
| Sasaran 1:<br>Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Inovasi yang dihasilkan guna menarik investor/penanam modal masih kurang</li> <li>Masih belum optimalnya pengetahuan serta kepatuhan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia sempat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2014 hingga 2019</li> <li>Stagnasi (perlambatan) pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Amerika Serikat dan China. Prediksi IMF pertumbuhan ekonomi global akan stagnan hingga tahun 2023.</li> <li>Penurunan <i>global trade volume</i></li> <li>Merebaknya wabah virus Covid-19</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia yang melimpah</li> <li>Pergeseran paradigma penanaman modal di Indonesia dari sektor yang berbasis SDA ke sektor yang memproduksi barang konsumsi</li> <li>Berkembangnya ekonomi digital</li> </ul> |
| Sasaran 2:<br>Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya jumlah maupun teknik promosi yang dilakukan guna meningkatkan kepercayaan investor</li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Daya tarik investasi negara-negara <i>peers</i> khususnya dalam menarik relokasi investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok.</li> <li>Tren <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) yang meningkat (5,5%-6,8%), namun masih lebih rendah dari negara-negara ASEAN.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>CEO World Magazine</i> (2019) menempatkan Indonesia di peringkat 4 dari 67 negara sebagai Negara dengan daya tarik investasi (skor 84.4)</li> </ul>  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Melayani  | -   | -  | -  |
| <b>Sasaran Strategis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur</b> |   |  |  |
| Sasaran 1: Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal  | Kurangnya pemahaman serta <i>awareness</i> akan kepatuhan terhadap pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum maksimalnya pemanfaatan LKPM Online oleh PMA/PMDN sebagai sarana pencatatan realisasi investasi</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan penyediaan lahan pembangunan di sektor kawasan industri guna mendorong investasi</li> </ul>  |
| Sasaran 2: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lamanya proses perizinan melalui OSS RBA akibat banyak klasifikasi NSPK KBLI yang belum diatur pada OSS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbitnya PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP 6 Tahun 2021</li> <li>Adanya pelimpahan wewenang Perizinan dari Kabupaten/Kota dan Pusat atau sebaliknya sebagai tindak lanjut dari PP 6 Tahun 2021</li> <li>Adanya migrasi aplikasi pelayanan perizinan dari OSS 1.1 ke OSS RBA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izin Usaha Industri telah dilimpahkan ke PTSP BKPM sehingga berpeluang peningkatan kualitas pelayanan perizinan dengan proses yang terpusat.</li> <li>Sosialisasi penyederhanaan sistem OSS RBA serta <i>digital signature</i> yang terus dilakukan oleh Pusat</li> </ul> |
| Sasaran 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja   | Peraturan yang sangat sering berubah dan cenderung terdapat <i>redundancy</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan deregulasi sebagai bentuk sinkronisasi kinerja antara pusat dan daerah</li> </ul>   | -  |

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam perencanaan Perangkat Daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan kesesuaian dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya antara lain:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan PD
2. Hasil analisis Renstra-PD Provinsi
3. Hasil telaahan RTRW dan
4. Hasil analisis KLHS

Sesuai analisis berdasarkan 4 (empat) komponen di atas, maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

| No | Pokok Masalah  | Masalah  | Akar Masalah  |
|----|--|--|---|
| 1. | Perlunya peningkatan pertumbuhan realisasi investasi untuk mendukung Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa | Kurangnya pemahaman yang komprehensif oleh pelaku usaha dan/atau perusahaan terhadap tata cara pengisian LKPM Online pada sistem OSS setelah sistem terbaru terintegrasi | Terbatasnya sumber daya pada pelaksanaan sosialisasi / kunjungan. Pelaku usaha atau perusahaan tidak hanya sekali dilakukan kunjungan / sosialisasi dengan tujuan membangun kedekatan agar dapat memahami komitmen pelaku usaha atau perusahaan akan kewajiban melaporkan kegiatan penanaman modal. |
| 2. | Perlu peningkatan pelayanan dan integrasi sistem perizinan dan nonperizinan.   | Lamanya proses perizinan melalui OSS RBA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa KBLI memiliki NSPK yang belum diatur pada sistem OSS</li> <li>• Sering terjadinya <i>maintenance</i> pada sistem OSS</li> </ul>   |

## 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Hasil identifikasi tentang permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga akan menjadi masukan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.

Titik utama yang disampaikan pada sub bab ini adalah apa saja tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selain itu disampaikan juga faktor pendorong serta penghambat

pencapaian visi dan misi RPJMD sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penjabaran atas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disampaikan pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD**

| <b>Visi : Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan</b>  |                                  |   |   |   |  |
|--|----------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.</b> |                                  |   |   |   |  |
| <b>No</b>  | <b>Tujuan dan Sasaran</b>        | <b>Indikator</b>                        | <b>Identifikasi Permasalahan</b>  | <b>Faktor</b>   |  |
|  |                                  |   |   | <b>Penghambat</b>   | <b>Pendorong</b>   |
| 1  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Laju Pertumbuhan Ekonomi                | Minat Realisasi Investasi di Kota Surabaya  | Belum selesainya pandemi covid-19 yang mempengaruhi ekonomi global  | Posisi Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa serta sebagai pintu gerbang akses perdagangan ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur |
| 2  | Meningkatnya investasi daerah    | Persentase Peningkatan Investasi Daerah | Akses data detail perusahaan terhadap realisasi investasi melalui perijinan berusaha            | Keterbatasan akses yang diberikan oleh BKPM RI sehubungan dengan belum sempurnanya aplikasi perijinan berusaha                  | Realisasi investasi dapat di akses secara otomatis dari LKPM yang terintegrasi dari aplikasi perijinan berusaha                            |
|  |                                  |   | Terus berkembangnya data potensi investasi karena perkembangan pelaku usaha yang sangat dinamis | Belum lengkapnya informasi secara digital tentang peluang dan potensi investasi yang efektif dan efisien untuk menarik investor | Adanya data unit pengembangan di Kota Surabaya   |
|  |                                  |   | Perlunya inovasi yang terus dikembangkan dalam pelaksanaan promosi untuk menarik minat investor | Data potensi investasi yang perlu di mutakhirkan sebagai bahan promosi  | Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa yang sudah berkembang  |

**Visi : Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan**

**Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.**

| No | Tujuan dan Sasaran | Indikator | Identifikasi Permasalahan   | Faktor  |  |
|----|--------------------|-----------|---|---|--|
|    |                    |           |   | Penghambat  | Pendorong  |
|    |                    |           | Realisasi investasi yang dihitung dari laporan kegiatan penanaman modal           | Kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kewajiban usahanya  | Realisasi investasi dapat di akses secara otomatis dari LKPM yang terintegrasi dari aplikasi perijinan berusaha                              |
|    |                    |           | Integritas dan kapabilitas sumber daya manusia yang menangani pelayanan perijinan | Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mengenai permasalahan perijinan                                     | Sistem informasi perijinan sudah menggunakan sistem <i>online</i> sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait perijinan |
|    |                    |           | sistem aplikasi yang digunakan dalam perijinan                                    | Belum optimal dan terintegrasinya sistem perijinan berusaha dan persyaratan dasar yang disediakan oleh pemerintah pusat | Adanya sistem pendukung yang dikembangkan pemerintah daerah agar pelayanan perijinan dan non perijinan tetap dapat terlaksana                |

**Visi : Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan**

**Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

| No | Tujuan dan Sasaran   | Indikator                  | Identifikasi Permasalahan   | Faktor  |  |
|----|--|----------------------------|---|---|--|
|    |  |                            |   | Penghambat  | Pendorong  |
| 1  | Terselenggaranya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif | Indeks Reformasi Birokrasi | Integritas dan kapabilitas sumber daya manusia yang menangani pelayanan perijinan | Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mengenai permasalahan perijinan | Sistem informasi perijinan sudah menggunakan sistem <i>online</i> sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait perijinan |

Visi : Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan

Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

| No | Tujuan dan Sasaran   | Indikator                 | Identifikasi Permasalahan                      | Faktor   |   |
|----|--|---------------------------|--|--|---|
|    |  |                           |  | Penghambat   | Pendorong   |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan public yang efektif dan inovatif | Nilai Kepuasan Masyarakat | sistem aplikasi yang digunakan dalam perijinan | Belum optimal dan terintegrasinya sistem perijinan berusaha dan persyaratan dasaryang disediakan oleh pemerintah pusat | Adanya sistem pendukung yang dikembangkan pemerintah daerah agar pelayanan perijinan dan non perijinan tetap dapat terlaksana |

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan sasaran strategis pada Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2020-2024 dan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2019-2024, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Hasil telaah beserta faktor pendorong maupun faktor penghambat ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Pemetaan Telaah dan Faktor Pendorong serta Penghambat Berdasarkan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

| Sasaran Renstra K/L dan Provinsi                                  | Permasalahan Pelayanan ( <i>Existing</i> ) di PD yang berkaitan dengan Renstra K/L | Faktor Penghambat   | Faktor Pendorong  |
|---|--|---|---|
| <b>Sasaran Strategis Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal</b> |  |   |   |
| Sasaran 1: Meningkatnya   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inovasi yang dihasilkan</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyederhanaan proses investasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses integrasi sistem OSS dan</li> </ul> |

| Sasaran Renstra K/L dan Provinsi  | Permasalahan Pelayanan ( <i>Existing</i> ) di PD yang berkaitan dengan Renstra K/L   | Faktor Penghambat  | Faktor Pendorong  |
|---|--|--|---|
| Realisasi Penanaman Modal;  | guna menarik investor/penanam modal masih kurang <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih belum optimalnya pengetahuan serta kepatuhan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</li> </ul> | yang belum sesuai dengan ekspektasi investor <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang maksimalnya pendampingan dalam pemenuhan LKPM dari pemerintah daerah kepada investor</li> <li>Sosialisasi terkait pentingnya LKPM untuk seluruh kategori investor (tidak hanya diatas Rp 10 Milyar) masih belum menyeluruh</li> </ul> | SPIPISE dengan rencana tata ruang <ul style="list-style-type: none"> <li>OSS akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan investor</li> </ul>   |
| Sasaran 2: Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal;   | Masih kurangnya jumlah maupun teknik promosi yang dilakukan guna meningkatkan kepercayaan investor   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas mediasi antara pemerintah daerah dengan investor masih kurang</li> <li>Prospek arah perkembangan investasi daerah yang masih belum tersampaikan dengan baik kepada investor</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR) yang sesuai dengan tren global dan kapasitas masing-masing daerah</li> </ul> |
| Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Melayani  | -  | -  | -   |
| <b>Sasaran Strategis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur</b> |  |  |   |
| Sasaran 1: Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal  | Kurangnya pemahaman serta <i>awareness</i> akan kepatuhan terhadap   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya standar operasional atau modul khusus dari internal sebagai <i>guidance</i> saat</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber Daya Manusia yang ada saat ini telah dilakukan peningkatan</li> </ul>   |

| Sasaran Renstra K/L dan Provinsi   | Permasalahan Pelayanan ( <i>Existing</i> ) di PD yang berkaitan dengan Renstra K/L                      | Faktor Penghambat  | Faktor Pendorong  |
|--|---|--|---|
|  | pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)   | mendampingi investor terkait pemanfaatan LKPM Online <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya promosi investasi yang sesuai dengan kebutuhan investor baik <i>virtual</i> maupun <i>hybrid</i>.</li> </ul> | kapasitas serta kompetensi di bidang penanaman modal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi investasi serta fasilitasi atas penyelesaian permasalahan penanaman modal telah berjalan secara rutin.</li> </ul> |
| Sasaran 2: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Lamanya proses perizinan melalui OSS RBA akibat banyak klasifikasi NSPK KBLI yang belum diatur pada OSS | Belum dilakukannya penyesuaian maupun sikap yang responsif atas perubahan-perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat seputar penyelenggaraan pelayanan perizinan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberadaan SSW Alfa sebagai komplemen dari OSS sehingga proses migrasi perizinan menjadi secara terpusat dapat diproses melalui SSW Alfa terlebih dahulu.</li> </ul>           |
| Sasaran 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja  | -   | -  | -   |

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kajian Lingkungan Hidup telah dilakukan pada program-program dalam RPJMD termasuk program terkait tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. KLHS telah memberikan alternatif dan rekomendasi terhadap program-program tersebut dan telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lagi melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di periode lima tahun mendatang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianalisa dan dirumuskan melalui analisa SWOT Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 ini, berdasarkan penjabaran tersebut, maka isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 ditunjukkan pada tabel 3.4

**Tabel 3.4**  
**Penentuan Isu-isu Strategis**

| No. | Permasalahan                                       | Isu Strategis   |
|-----|--|---|
| 1.  | Peningkatan kondusifitas iklim dan minat investasi | Pengembangan data potensi dan peluang investasi sebagai panduan informasi bagi pelaku usaha dalam berinvestasi di Kota Surabaya |

| No. | Permasalahan   | Isu Strategis  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>Inovasi dalam pelaksanaan promosi investasi guna menarik minat investor</p> <p>Pendampingan intensif kepada pelaku usaha berkaitan dengan kepatuhan terhadap pemenuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal</p>   |
| 2.  | <p>Peningkatan partisipasi angkatan kerja yang berasal dari penduduk usia kerja Kota Surabaya di setiap segmen usaha hasil investasi yang masuk ke Kota Surabaya</p> | <p>Sinergi antara Pemerintah Kota melalui PD terkait dengan setiap elemen dunia usaha seperti calon investor, penduduk usia kerja, serta masyarakat untuk berkomitmen dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja yang berasal dari penduduk Kota Surabaya.</p>  |
| 3.  | <p>Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan pelayanan non perizinan</p>  | <p>Pemantapan sistem informasi yang transparan dan mudah untuk diakses oleh masyarakat khususnya calon investor</p> <p>Penyederhanaan serta efisiensi birokrasi dalam pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan pelayanan non perizinan</p> <p>Optimalisasi sistem yang telah terintegrasi oleh pusat melalui OSS</p> <p>Memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait alur pelayanan perizinan berusaha khususnya pembaruan ketentuan yang mengatur setiap proses pelayanan perizinan berusaha.</p> |

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan PD adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu kepada sasaran kota sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam sasaran kota pada Misi 1 yaitu Meningkatnya investasi daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi Daerah dan sasaran kota pada Misi 4 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat. Indikator sasaran kota tersebut diturunkan menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah investor PMA/PMDN
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dengan memperhatikan program-program RPJMD Kota Surabaya, kedua sasaran ini memiliki beberapa program yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- e. Program Pelayanan Penanaman Modal
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 (T-C.25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu**  
**Pintu Kota Surabaya**

| No  | Tujuan / Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran   | Target Kinerja     |                      |                      |                    |                    |
|-----|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|     |  |  | 2022               | 2023                 | 2024                 | 2025               | 2026               |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif   | Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan                         | 88,31 %            | 89,23 %              | 90,16 %              | 91,08 %            | 92,01 %            |
| 1.1 | Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 84,73              | 86,05                | 87,39                | 88,75              | 90,13              |
| 1.2 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik   | Indeks Pelayanan Penanaman Modal                                   | 90 %               | 92 %                 | 94 %                 | 96 %               | 98 %               |
| 2   | Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan                        | Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah                      | 4,60 %             | 5,50 %               | 6,30 %               | 6,90 %             | 7,40 %             |
| 2.1 | Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN  | Nilai Investasi Daerah   | 45 Triliyun Rupiah | 47.5 Triliyun Rupiah | 50.5 Triliyun Rupiah | 54 Triliyun Rupiah | 58 Triliyun Rupiah |

Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik (*smart governance*) efektif, efisien, profesional, transparan serta akuntabel dimana hal tersebut terlihat pada peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yang diwujudkan melalui penggunaan proses layanan perizinan usaha dilakukan secara elektronik (online) atau yang disebut sebagai SSW (*Surabaya Single Window*) Mobile pada tanggal 14 Maret 2013. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan. *Platform* secara online ini diyakini akan menambah jumlah investasi di Surabaya, dimana pelayanan publik merupakan bagian penting yang menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan investasi dan sekarang dalam tahapan integrasi dengan OSS (*Online Single Submission*) sebagaimana diamanatkan dalam PP 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan dasar kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan berusaha dan untuk menjaga kualitas perizinan berusaha, yang diselenggarakan menggunakan sistem informasi elektronik dari Pemerintah Pusat.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2022-2026. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi RPJMD ini tidak hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kota Surabaya yang memiliki tantangan dan peluang kompleks ke depan, sekaligus menyentuh masyarakat di segala level ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pelayanan. Strategi juga memperhatikan faktor internal dan eksternal dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam memberikan pelayanan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, perangkat daerah mengambil suatu kebijakan yang merupakan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Arah Kebijakan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2022 – 2026 dirumuskan berdasarkan Strategi yang dijabarkan pelaksanaannya dalam lima tahun ke depan, sehingga dapat diketahui Tema Kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Renja ( Rencana Kerja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya..

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

| <b>VISI : Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan</b>  |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>MISI I : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional</b> |  |   |  |
| <b>MISI IV : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>  |  |   |  |
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>                                     | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
| Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan   | 1. Meningkatkan jumlah investor PMA/PMDN           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Surabaya</li> <li>Pemutakhiran peta potensi investasi sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak swasta/asosiasi penanam modal melalui <i>Business Gathering/Forum Government to Government of government to business</i> dalam rangka promosi peluang investasi baru di Kota Surabaya</li> <li>Membuat Peraturan Daerah terkait Penanaman Modal dan Deregulasi serta penyesuaian Peraturan Daerah dan Kepala Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kebijakan terkait pemberian insentif/kemudahan berusaha bagi pelaku usaha</li> <li>Pemutakhiran data potensi investasi sesuai penataan kawasan potensial disertai penghitungan analisis peluang usaha berbasis teknologi</li> </ul> |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif  | 2. Mengelola sarana dan prasarana perangkat daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan berbasis kinerja disertai output dan outcome yang jelas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana tepat sasaran dan tepat waktu</li> </ul>  |
|   | 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan Inovasi dalam rangka pengembangan Sistem Elektronik Perizinan</li> <li>Memastikan terlaksananya pelayanan publik yang transparan dan menjamin kepastian hukum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi yang intens dengan BKPM RI untuk perbaikan dan pemutakhiran Sistem Perizinan OSS mengintegrasikan RDTRK Kota Surabaya dengan Sistem Perizinan OSS</li> <li>Mengembangkan fitur-fitur tambahan dalam Sistem Perizinan Daerah seperti Survei Kepuasan Masyarakat dan Desk Informasi Perizinan yang bertujuan memberikan informasi dan kejelasan bagi pelaku usaha untuk memulai usaha</li> <li>Melakukan evaluasi atas Standar</li> </ul>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan guna memastikan pelaksanaan Perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam perizinan dan pengawasan serta pengendalian Penanaman Modal</li> <li>• Menyediakan berbagai macam sarana pengaduan yang dapat dipantau oleh masyarakat serta menyelenggarakan Survei Kepuasan yang menjadi tolak ukur perbaikan layanan</li> </ul> |
|--|--|--|--|

Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara arah kebijakan yang ada di RPJMD Kota Surabaya Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026, dilakukan identifikasi terkait linearitas arah kebijakan RPJMD yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sinkronisasi arah kebijakan pada RPJMD dengan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditunjukkan pada tabel 5.2 berikut ini:

**Tabel 5.2**

**Linearitas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

| No | Arah Kebijakan  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1  | Percepatan dan efisiensi proses izin berusaha yang masuk di Kota Surabaya dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan kebijakan yang berlaku. |      | √    | √    | √    | √    |
| 2  | Peningkatan komitmen pengendalian penanaman modal melalui intensifikasi pendampingan, pembinaan, serta pengawasan investor.                       |      | √    | √    | √    | √    |
| 3  | Pemeliharaan sarana dan prasana untuk dapat digunakan dengan baik   | √    | √    | √    | √    | √    |
| 4  | Pengembangan SDM untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan                         | √    | √    | √    | √    | √    |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022-2026. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.** Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan.
- 2. Program Pelayanan Penanaman Modal.** Program pelayanan Penanaman modal memiliki Indikator ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal.
- 3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.** Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki indikator jumlah investor PMA/PMDN.
- 4. Program Promosi Penanaman Modal.** Program Promosi Penanaman Modal memiliki indikator Persentase Calon Investor / Investor yang mempunyai Minat Berinvestasi.
- 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.** Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki indikator Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis.
- 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.** Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki indikator jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal.

Dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, seperti tersebut pada tabel di bawah ini, bahwa lokasi indikatif pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Genteng Surabaya.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 5 (lima) tahun kedepan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh digunakan untuk mendanai 6 program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari program-program tersebut.

Apabila dilihat dari nilai anggaran, maka terdapat peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diharapkan mampu membantu pencapaian target yang telah ditetapkan dalam program-program yang telah disusun. Sehingga peningkatan anggaran akan diiringi dengan peningkatan kinerja.

Berikut ini adalah Tabel TC.27 tentang Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya berdasarkan Perubahan RPJMD 2016-2021.

Pada tabel T-C.27, tampak bahwa pada tahun 2022-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memiliki 1 tujuan utama. Tujuan tersebut yakni Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator tujuan Persentase Peningkatan Investasi Daerah. Tujuan tersebut membawahi 2 Sasaran Utama dan 2 indikator sasaran. Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memiliki 4 Program dengan 4 indikator program serta 8 kegiatan dengan 8 indikator kegiatan. Total pagu pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar Rp20.691.290.956 hingga pada tahun 2026 sebesar Rp24.554.172.328.

Salah satu keterkaitan agenda pokok Kepala Daerah dengan program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah peningkatan

kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya, salah satunya melalui pembangunan 4 mal pelayanan publik mini merata ke seluruh Surabaya. Pembangunan 4 mal pelayanan publik ini merupakan salah satu Janji Kepala Daerah yang sinkron dengan kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal. Selain menambah titik pelayanan baru yang semakin merata di Kota Surabaya, pembangunan mal pelayanan publik baru juga akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau pelayanan publik, ditambah dengan pemantapan pelayanan publik di Kota Surabaya yang berbasis teknologi informasi.

Tabel 6.1 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

| Tujuan / Sasaran   | Kode    | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   | PD Penanggung Jawab | Lokasi            |  |    |
|--|---------|---|--|-------------------------|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|--|----|
|  |         |   |  |                         | 2022  |                   | 2023    |                   | 2024    |                   | 2025    |                   | 2026    |                   |                     |                   | Kondisi Akhir  |    |
|  |         |   |  |                         | Target  | Rp                | Target  | Rp                | Target  | Rp                | Target  | Rp                | Target  | Rp                |                     |                   | Target   | Rp |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif   |         |   | Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan                         | 86,05 %                 | 88,31 %                                       | Rp 18.709.599.016 | 89,23 % | Rp 19.516.990.021 | 90,16 % | Rp 19.768.904.201 | 91,08 % | Rp 20.800.598.397 | 92,01 % | Rp 21.716.946.561 | 92,01 %             | Rp 21.716.946.561 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |
| Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |         |   | Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 84,72                   | 84,73   | Rp 14.163.034.181 | 86,05   | Rp 14.685.552.631 | 87,39   | Rp 15.045.387.913 | 88,75   | Rp 15.437.187.863 | 90,13   | Rp 15.852.454.611 | 90,13               | Rp 15.852.454.611 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |
|  | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan        | 88,12 %                 | 89 %  | Rp 14.163.034.181 | 90 %    | Rp 14.685.552.631 | 91 %    | Rp 15.045.387.913 | 92 %    | Rp 15.437.187.863 | 93 %    | Rp 15.852.454.611 | 93 %                | Rp 15.852.454.611 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |

| Tujuan / Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                      | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   | PD Penanggung Jawab                                    | Lokasi |
|------------------|-----------------|--|--|-------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--------|
|                  |                 |  |  |                         | 2022  |                   | 2023           |                   | 2024           |                   | 2025           |                   | 2026           |                   | Kondisi Akhir  |                   |  |        |
|                  |                 |  |  |                         | Target  | Rp                | Target         | Rp                | Target         | Rp                | Target         | Rp                | Target         | Rp                | Target         | Rp                |  |        |
|                  | 2.18.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN        | 100 %                   | 100 %   | Rp 12.271.579.880 | 100 %          | Rp 12.578.369.377 | 100 %          | Rp 12.892.828.611 | 100 %          | Rp 13.215.149.327 | 100 %          | Rp 13.545.528.060 | 100 %          | Rp 13.545.528.060 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
|                  | 2.18.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                  | 27 Orang/bulan          | Orang/bulan                                   | Rp 12.271.579.880 | 27 Orang/bulan | Rp 12.578.369.377 | 27 Orang/bulan | Rp 12.892.828.611 | 27 Orang/bulan | Rp 13.215.149.327 | 27 Orang/bulan | Rp 13.545.528.060 | 27 Orang/bulan | Rp 13.545.528.060 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
|                  | 2.18.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa                            | 100 %                   | 100 %   | Rp 1.891.454.301  | 100 %          | Rp 2.107.183.254  | 100 %          | Rp 2.152.559.302  | 100 %          | Rp 2.222.038.536  | 100 %          | Rp 2.306.926.551  | 100 %          | Rp 2.306.926.551  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
|                  |                 |  | Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantor             | 100 %                   | 100 %   |                   | 100 %          |                   | 100 %          |                   | 100 %          |                   | 100 %          |                   | 100 %          |                   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu            |        |

| Tujuan / Sasaran                       | Kode            | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan               | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |                         |            |                         |            |                         |            |                         |            |                         |    | PD Penanggung Jawab                                    | Lokasi |
|--|-----------------|---|--|-------------------------|---|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----|--|--------|
|  |                 |   |  |                         | 2022  |            | 2023                    |            | 2024                    |            | 2025                    |            | 2026                    |            | Kondisi Akhir           |    |  |        |
|  |                 |   |  |                         | Target  | Rp         | Target                  | Rp         | Target                  | Rp         | Target                  | Rp         | Target                  | Rp         | Target                  | Rp |  |        |
|  |                 |   | an   |                         |   |            |                         |            |                         |            |                         |            |                         |            |                         |    | Satu Pintu   |        |
|  | 2.18.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan              | Laporan<br>Rp 177.880.908                     | 12 Laporan | Rp 182.598.752          | 12 Laporan | Rp 179.401.070          | 12 Laporan | Rp 180.186.668          | 12 Laporan | Rp 180.989.790          | 12 Laporan | Rp 180.989.790          |    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
|  | 2.18.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan             | 12 Laporan              | Laporan<br>Rp 1.713.573.393                   | 12 Laporan | Rp 1.924.584.502        | 12 Laporan | Rp 1.973.158.232        | 12 Laporan | Rp 2.041.851.868        | 12 Laporan | Rp 2.125.936.761        | 12 Laporan | Rp 2.125.936.761        |    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik |                 |   | Indeks Pelayanan Penanaman Modal   | 90 %                    | 90 %<br><b>Rp 4.546.564.835</b>               | 92 %       | <b>Rp 4.831.437.390</b> | 94 %       | <b>Rp 4.723.516.288</b> | 96 %       | <b>Rp 5.363.410.534</b> | 98 %       | <b>Rp 5.864.491.950</b> | 98 %       | <b>Rp 5.864.491.950</b> |    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |

| Tujuan / Sasaran | Kode         | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan  | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  | PD Penanggung Jawab                                    | Lokasi |
|------------------|--------------|---|---|-------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|--------|
|                  |              |   |   |                         | 2022  |                  | 2023                  |                  | 2024                  |                  | 2025                  |                  | 2026                  |                  | Kondisi Akhir         |                  |  |        |
|                  |              |   |   |                         | Target  | Rp               | Target                | Rp               | Target                | Rp               | Target                | Rp               | Target                | Rp               | Target                | Rp               |  |        |
|                  | 2.18.04      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal   | 100 %                   | 100 %   | Rp 4.546.564.835 | 100 %                 | Rp 4.831.437.390 | 100 %                 | Rp 4.723.516.288 | 100 %                 | Rp 5.363.410.534 | 100 %                 | Rp 5.864.491.950 | 100 %                 | Rp 5.864.491.950 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
|                  | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan | 60.000 berkas           | 80.000 berkas                                 | Rp 4.546.564.835 | 85.000 berkas         | Rp 4.831.437.390 | 90.000 berkas         | Rp 4.723.516.288 | 95.000 berkas         | Rp 5.363.410.534 | 100.000 berkas        | Rp 5.864.491.950 | 100.000 berkas        | Rp 5.864.491.950 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
|                  |              |   | Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan   | 11.000 Kegiatan usaha   | 11.000 Kegiatan usaha                         |                  | 11.500 Kegiatan usaha |                  | 11.500 Kegiatan usaha |                  | 12.000 Kegiatan usaha |                  | 12.000 Kegiatan usaha |                  | 12.000 Kegiatan usaha |                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
|                  | 2.18.        | Pemantau  | Jumlah  | 11.000                  | Kegiatan                                      | Rp 832.821.      | 11.500                | Rp 943.454.      | 11.500                | Rp 990.450.      | 12.000                | Rp 1.039.93      | 12.000                | Rp 1.092.02      | 12.000                | Rp 1.092.02      | Dinas  |        |

| Tujuan / Sasaran             | Kode            | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan   | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    | PD Penanggung Jawab                                    | Lokasi |
|------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|--------|
|                              |                 |   |  |                         | 2022  |                    | 2023                |                    | 2024                |                    | 2025                |                    | 2026                |                    | Kondisi Akhir       |                    |  |        |
|                              |                 |   |  |                         | Target  | Rp                 | Target              | Rp                 | Target              | Rp                 | Target              | Rp                 | Target              | Rp                 | Target              | Rp                 |  |        |
|                              | 04.2.01.02      | an Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal   | Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal                              | Kegiatan Usaha          | n Usaha                                       | 644                | Kegiatan Usaha      | 043                | Kegiatan Usaha      | 385                | Kegiatan Usaha      | 0.753              | Kegiatan Usaha      | 6.911              | Kegiatan Usaha      | 6.911              | Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu       |        |
|                              | 2.18.04.2.01.01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 3.500 Pelaku Usaha      | Pelaku Usaha                                  | Rp 3.713.743.191   | 10.000 Pelaku Usaha | Rp 3.887.983.347   | 12.000 Pelaku Usaha | Rp 3.733.065.903   | 14.000 Pelaku Usaha | Rp 4.323.479.781   | 16.000 Pelaku Usaha | Rp 4.772.465.039   | 16.000 Pelaku Usaha | Rp 4.772.465.039   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
| Meningkatnya nilai investasi |                 |   | Persentase   | 2,71 %                  | 4,60 %  | <b>Rp 1.979.95</b> | 5,50 %              | <b>Rp 2.326.39</b> | 6,30 %              | <b>Rp 2.427.68</b> | 6,90 %              | <b>Rp 2.715.42</b> | 7,40 %              | <b>Rp 2.837.22</b> | 7,40 %              | <b>Rp 2.837.22</b> | Dinas Penana   |        |

| Tujuan / Sasaran   | Kode         | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |                      |                  |                      |                  |                    |                  |                    |                  | PD Penanggung Jawab | Lokasi           |  |    |
|--|--------------|---|--|-------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|--|----|
|  |              |   |  |                         | 2022  |                  | 2023                 |                  | 2024                 |                  | 2025               |                  | 2026               |                  |                     |                  | Kondisi Akhir  |    |
|  |              |   |  |                         | Target  | Rp               | Target               | Rp               | Target               | Rp               | Target             | Rp               | Target             | Rp               |                     |                  | Target   | Rp |
| yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan |              |   | Peningkatan Nilai Investasi Daerah                                 |                         |   | 7.036            |                      | 8.286            |                      | 4.400            |                    | 4.981            |                    | 5.767            |                     | 5.767            | man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu             |    |
| Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN                                  |              |   | Nilai Investasi Daerah   | 22 Triliyun Rupiah      | 45 Triliyun Rupiah                            | Rp 1.979.957.036 | 47.5 Triliyun Rupiah | Rp 2.326.398.286 | 50.5 Triliyun Rupiah | Rp 2.427.684.400 | 54 Triliyun Rupiah | Rp 2.715.424.981 | 58 Triliyun Rupiah | Rp 2.837.225.767 | 58 Triliyun Rupiah  | Rp 2.837.225.767 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |
|  | 2.18.02      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL      | Jumlah Investor PMA/PM DN  | N/A                     | 150 Perusahaan                                | Rp 441.981.664   | 170 Perusahaan       | Rp 577.939.876   | 190 Perusahaan       | Rp 584.238.272   | 210 Perusahaan     | Rp 635.019.971   | 230 Perusahaan     | Rp 665.825.252   | 230 Perusahaan      | Rp 665.825.252   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |
|  | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang      | 0 %                     | 70 %  | Rp 441.981.664   | 72 %                 | Rp 577.939.876   | 74 %                 | Rp 584.238.272   | 76 %               | Rp 635.019.971   | 78 %               | Rp 665.825.252   | 78 %                | Rp 665.825.252   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |

| Tujuan / Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                       | Data Capaian Tahun Awal     | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                               | PD Penanggung Jawab   | Lokasi   |    |
|------------------|-----------------|---|--|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----|
|                  |                 |   |  |                             | 2022  |                       | 2023                          |                       | 2024                          |                       | 2025                          |                       | 2026                          |                       | Kondisi Akhir                 |                       |  |    |
|                  |                 |   |  |                             | Target  | Rp                    | Target                        | Rp                    | Target                        | Rp                    | Target                        | Rp                    | Target                        | Rp                    | Target                        |                       |  | Rp |
|                  |                 |   | Usaha  |                             |   |                       |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                               |                       | Pintu  |    |
|                  | 2.18.02.2.02.02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                              | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                           | 4 Dokumen                   | Dokumen                                       | Rp 441.981.664        | 4 Dokumen                     | Rp 577.939.876        | 4 Dokumen                     | Rp 584.238.272        | 4 Dokumen                     | Rp 635.019.971        | 4 Dokumen                     | Rp 665.825.252        | 4 Dokumen                     | Rp 665.825.252        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |
|                  | 2.18.03         | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi                   | N/A                         | 50 %  | <b>Rp 606.456.014</b> | 55 %                          | <b>Rp 658.709.199</b> | 55 %                          | <b>Rp 684.022.654</b> | 60 %                          | <b>Rp 694.510.379</b> | 60 %                          | <b>Rp 738.216.183</b> | 60 %                          | <b>Rp 738.216.183</b> | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |
|                  | 2.18.03.2.01    | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi | 0 Calon Investor / Investor | 200 Calon Investor / Investor                 | Rp 606.456.014        | 250 Calon Investor / Investor | Rp 658.709.199        | 250 Calon Investor / Investor | Rp 684.022.654        | 300 Calon Investor / Investor | Rp 694.510.379        | 300 Calon Investor / Investor | Rp 738.216.183        | 300 Calon Investor / Investor | Rp 738.216.183        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |
|                  | 2.18.03.2.      | Pelaksanaan   | Jumlah Dokumen   | 3 Dokumen                   | Dokum   | Rp 606.456.           | 3 Dokumen                     | Rp 658.709.           | 3 Dokumen                     | Rp 684.022.           | 3 Dokumen                     | Rp 694.510.           | 3 Dokumen                     | Rp 738.216.           | 3 Dokumen                     | Rp 738.216.           | Dinas Penana   |    |

| Tujuan / Sasaran | Kode         | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan   | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | PD Penanggung Jawab                                    | Lokasi |
|------------------|--------------|--|--|-------------------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------|
|                  |              |  |  |                         | 2022  |                | 2023             |                | 2024             |                | 2025             |                  | 2026             |                  | Kondisi Akhir    |                  |  |        |
|                  |              |  |  |                         | Target  | Rp             | Target           | Rp             | Target           | Rp             | Target           | Rp               | Target           | Rp               | Target           | Rp               |  |        |
|                  | 01.02        | Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                 | Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota  | en                      | en  | 014            | en               | 199            | en               | 654            | en               | 379              | en               | 183              | en               | 183              | man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu             |        |
|                  | 2.18.05      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                       | Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis | 42,41 %                 | 42 %  | Rp 642.976.661 | 43 %             | Rp 784.095.808 | 44 %             | Rp 907.688.445 | 45 %             | Rp 1.005.605.182 | 46 %             | Rp 1.056.164.066 | 46 %             | Rp 1.056.164.066 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
|                  | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun  | 0 perusahaan            | 1.100 perusahaan                              | Rp 642.976.661 | 1.200 perusahaan | Rp 784.095.808 | 1.300 perusahaan | Rp 907.688.445 | 1.400 perusahaan | Rp 1.005.605.182 | 1.500 perusahaan | Rp 1.056.164.066 | 1.500 perusahaan | Rp 1.056.164.066 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |

| Tujuan / Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                            | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                     |                       |                     |                       |                     |                       |                     |                       |                     | PD Penanggung Jawab   | Lokasi   |    |
|------------------|-----------------|--|---|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|----|
|                  |                 |  |   |                         | 2022  |                       | 2023                |                       | 2024                |                       | 2025                |                       | 2026                |                       | Kondisi Akhir       |                       |  |    |
|                  |                 |  |   |                         | Target  | Rp                    | Target              | Rp                    | Target              | Rp                    | Target              | Rp                    | Target              | Rp                    | Target              |                       |  | Rp |
|                  |                 |  | yang belum mengikuti bimtek   |                         |   |                       |                     |                       |                     |                       |                     |                       |                     |                       |                     |                       |  |    |
|                  | 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal  | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                    | 75 Pelaku Usaha         | Pelaku Usaha                                  | Rp 69.892.358         | 260 Pelaku Usaha    | Rp 121.826.624        | 270 Pelaku Usaha    | Rp 260.652.400        | 280 Pelaku Usaha    | Rp 271.867.020        | 290 Pelaku Usaha    | Rp 283.670.298        | 290 Pelaku Usaha    | Rp 283.670.298        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |
|                  | 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 1.125 Kegiatan Usaha    | Kegiatan Usaha                                | Rp 573.084.303        | 2870 Kegiatan Usaha | Rp 662.269.184        | 2900 Kegiatan Usaha | Rp 647.036.045        | 2930 Kegiatan Usaha | Rp 733.738.162        | 2960 Kegiatan Usaha | Rp 772.493.768        | 2960 Kegiatan Usaha | Rp 772.493.768        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |
|                  | 2.18.06         | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN            | jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan  | N/A                     | 20 lembaga                                    | <b>Rp 288.542.697</b> | 20 lembaga          | <b>Rp 305.653.403</b> | 20 lembaga          | <b>Rp 251.735.029</b> | 20 lembaga          | <b>Rp 380.289.449</b> | 20 lembaga          | <b>Rp 377.020.266</b> | 20 lembaga          | <b>Rp 377.020.266</b> | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan                    |    |

| Tujuan / Sasaran | Kode            | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan   | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | PD Penanggung Jawab | Lokasi |  |  |
|------------------|-----------------|---|--|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------|--|--|
|                  |                 |   |  |                         | 2022  |                | 2023           |                | 2024           |                | 2025           |                | 2026           |                | Kondisi Akhir  |                     |        |  |  |
|                  |                 |   |  |                         | Target  | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         |                     |        | Rp   |  |
|                  |                 | MODAL   | penanaman modal  |                         |   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                     |        | Terpadu Satu Pintu                                     |  |
|                  | 2.18.06.2.01    | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal  | 0 perusahaan            | 300 perusahaan<br>Rp 288.542.697              | 350 perusahaan | Rp 305.653.403 | 400 perusahaan | Rp 251.735.029 | 450 perusahaan | Rp 380.289.449 | 500 perusahaan | Rp 377.020.266 | 500 perusahaan | Rp 377.020.266 |                     |        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
|                  | 2.18.06.2.01.01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 4 Dokumen               | Dokumen<br>Rp 288.542.697                     | 4 Dokumen      | Rp 305.653.403 | 4 Dokumen      | Rp 251.735.029 | 4 Dokumen      | Rp 380.289.449 | 4 Dokumen      | Rp 377.020.266 | 4 Dokumen      | Rp 377.020.266 |                     |        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |

| Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan             | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | PD Penanggung Jawab                                    | Lokasi |
|---|--|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------|
|   |  |                         | 2022  |                | 2023           |                | 2024           |                | 2025           |                | 2026           |                | Kondisi Akhir  |                |  |        |
|   |  |                         | Target  | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             |  |        |
| Meningkatnya Investasi Daerah   | Persentase Peningkatan Investasi Daerah                          | 2,71 %                  | 4,60 %  | 10.491.640.655 | 5,50 %         | 11.810.632.248 | 6,30 %         | 12.006.569.488 | 6,90 %         | 13.509.685.477 | 7,40 %         | 14.376.169.251 | 7,40 %         | 14.376.169.251 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
| Meningkatnya Kepercayaan Investor Terhadap Iklim Investasi Daerah             | Persentase Peningkatan Skala Usaha Investor PMA PMDN             | %                       | 5 %   |                | 5 %            |                | 6 %            |                | 6 %            |                | 7 %            |                | 7 %            |                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
| Meningkatnya Kualitas Pendampingan Investor Terhadap Ketentuan Pemenuhan LKPM | Persentase Investor PMA PMDN yang melaporkan LKPM                | %                       | 60 %  |                | 60 %           |                | 62 %           |                | 62 %           |                | 65 %           |                | 65 %           |                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
| Meningkatnya Kualitas Pembinaan Investor dalam Pemenuhan LKPM                 | Persentase Investor PMA PMDN yang Melaporkan LKPM setelah dibina | %                       | 60 %  |                | 60 %           |                | 62 %           |                | 62 %           |                | 65 %           |                | 65 %           |                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
| Intensifikasi Pengawasan Pemenuhan LKPM PMA PMDN                              | Jumlah Investor PMA PMDN yang Melaporkan LKPM setelah diawasi    | perusahaan              | 150 perusahaan                                |                | 150 perusahaan |                | 160 perusahaan |                | 160 perusahaan |                | 170 perusahaan |                | 170 perusahaan |                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |
| Meningkatnya Akses Data Investasi Daerah                                      | Persentase Akses Data Informasi Investasi                        | %                       | 40 %  |                | 40 %           |                | 42 %           |                | 42 %           |                | 45 %           |                | 45 %           |                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |        |

| Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |        |             |        |             |               |             | PD Penanggung Jawab | Lokasi   |  |
|------------------------------------|--|---|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|---------------------|--|--|
|                                    |  |   | 2022  |             | 2023   |             | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |             | Kondisi Akhir |             |                     |  |  |
|                                    |  |   | Target  | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target        | Rp          |                     |  |  |
|                                    | Pemutakhiran Data Investasi secara berkala           | Jumlah Data Investasi yang dimutakhirkan                                  | Data  | 40.000 Data |        | 40.000 Data |        | 43.000 Data |        | 43.000 Data |        | 45.000 Data |               | 45.000 Data |                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
|                                    | Terlaksananya Publikasi Data Investasi               | Jumlah Data Investasi yang Dipublikasikan                                 | Data  | 4 Data      |        | 4 Data      |        | 4 Data      |        | 4 Data      |        | 4 Data      |               | 4 Data      |                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
|                                    | Meningkatnya Jumlah Investor Baru                    | Persentase Peningkatan Investor Baru                                      | %   | 4 %         |        | 4 %         |        | 4,5 %       |        | 4,5 %       |        | 5 %         |               | 5 %         |                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
|                                    | Meningkatnya Daya Tarik Iklim Investasi Daerah       | Persentase Investor Yang Menyampaikan Minat Investasi                     | %   | 50 %        |        | 55 %        |        | 55 %        |        | 60 %        |        | 60 %        |               | 60 %        |                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
|                                    | Intensifikasi Kegiatan Promosi Investasi Daerah      | Persentase Keberhasilan Kegiatan Promosi Yang Menarik Minat Investor Baru | 100 %   | 100 %       |        | 100 %       |        | 100 %       |        | 100 %       |        | 100 %       |               | 100 %       |                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
|                                    | Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Daerah    | Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi yang diterbitkan             | 4 Dokumen                                     | 4 Dokumen   |        | 4 Dokumen   |        | 4 Dokumen   |        | 4 Dokumen   |        | 4 Dokumen   |               | 4 Dokumen   |                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
|                                    | Memper muda  | Persentase  | 100 %   | 100 %       |        | 100 %       |        | 100 %       |        | 100 %       |        | 100 %       |               | 100 %       |                     | Dinas  |  |

| Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan                               | Data Capaian Tahun Awal   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |       |        |       |        |       |        |       |        |       |               |       | PD Penanggung Jawab | Lokasi   |  |
|------------------------------------|--|---|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------------|-------|---------------------|--|--|
|                                    |  |   | 2022  |       | 2023   |       | 2024   |       | 2025   |       | 2026   |       | Kondisi Akhir |       |                     |  |  |
|                                    |  |   | Target  | Rp    | Target | Rp    | Target | Rp    | Target | Rp    | Target | Rp    | Target        | Rp    |                     |  |  |
|                                    | h Pelayanan Perizinan Investasi  | Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                         |   |       |        |       |        |       |        |       |        |       |               |       |                     | Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu       |  |
|                                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha                                 | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan Berusaha                       | 100 %   | 100 % |        | 100 % |        | 100 % |        | 100 % |        | 100 % |               | 100 % |                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
|                                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan | 100 %   | 100 % |        | 100 % |        | 100 % |        | 100 % |        | 100 % |               | 100 % |                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |

## **BAB VII**

### **KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURABAYA**

#### **7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 itu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Rencana strategis menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berbasis masyarakat (*Community base development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan adalah sebagai berikut.

Pada Tabel 7.1 (T-C.28) mengemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam periode Renstra Tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ke satu dan ke-empat RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2016, yaitu nilai kepuasan masyarakat bidang perizinan dan persentase peningkatan nilai investasi daerah. Sasaran untuk mendukung tercapainya tujuan ini adalah indeks pelayanan penanaman modal, nilai investasi daerah dan nilai sakiip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 7.1 (T-C.28)

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator  | Kondisi Awal       | Target             |                      |                      |                    |                    | Kondisi Akhir      |
|----|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|    |  |                    | 2022               | 2023                 | 2024                 | 2025               | 2026               |                    |
| 1  | <b>Tujuan</b><br>Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan                          | 86,05 %            | 88,31 %            | 89,23 %              | 90,16 %              | 91,08 %            | 92,01 %            | 92,01 %            |
| 2  | <b>Tujuan</b><br>Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah                       | 2,71 %             | 4,60 %             | 5,50 %               | 6,30 %               | 6,90 %             | 7,40 %             | 7,40 %             |
| 3  | <b>Sasaran</b><br>Indeks Pelayanan Penanaman Modal                                   | 90 %               | 90 %               | 92 %                 | 94 %                 | 96 %               | 98 %               | 98 %               |
| 4  | <b>Sasaran</b><br>Nilai Investasi Daerah   | 22 Triliyun Rupiah | 45 Triliyun Rupiah | 47.5 Triliyun Rupiah | 50.5 Triliyun Rupiah | 54 Triliyun Rupiah | 58 Triliyun Rupiah | 58 Triliyun Rupiah |
| 5  | <b>Sasaran</b><br>Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 84,72              | 84,73              | 86,05                | 87,39                | 88,75              | 90,13              | 90,13              |

## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya (RPJMD) Tahun 2021 - 2026. untuk mewujudkan Visi dan Misi secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Hal yang perlu ditekankan dalam Rencana Strategis ini adalah dianutnya alokasi anggaran program dan kegiatan yang masih bersifat indikatif dalam arti bahwa besaran anggaran dimaksud masih bersifat tentatif (atau belum definitif) sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan anggaran pada kegiatan yang direncanakan (namun tetap diupayakan untuk tidak merubah total pagu anggaran Perangkat Daerah) ketika dalam penyusunan atau pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2021–2026 ini dibuat semoga bisa dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Surabaya, 27 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU



Dewi Soeriyawati, ST., MT

Pembina Tk. I

NIP. 19740513200122000